Pedoman Kaderisasi KOPRI

(Korps PMII Putri)

Pedoman

Kaderisasi Kopri PMII

Pedoman

Kaderisasi Kopri PMII

TIM Kaderisasi Nasional
KOPRI PB PMII 2021-2024

Kopri Mandiri & Maju

TIM PENYUSUN

Penasehat : Alumni KOPRI PMII

Penanggung Jawab : Maya Muizatil Lutfillah (Ketua KOPRI PB PMII)
Nopa Supensi (Sekretaris KOPRI PB PMII)
Fitria Lesbasa (Bendahara KOPRI PB PMII)

Tim Penyusun :
- Ummu Sholihah
- Fatirahma Hanipa
- Okky Ayu Setyowati
- Triasih Kartikowati
- Tri Alipah Mustari
- Umi Ema Habibah
- Siti Nur Syamsiyah
- Ulfianur Afriani M
- Jum'attiah
- Ani Masruroh

Editor : Faiz Nur Faiqoh

KATA PENGANTAR

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) merupakan badan khusus Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang fokus pada pengembangan keterampilan kader putri PMII. Sebagai organisasi kader tentu proses kaderisasi memegang peran besar dalam pembangunan masa depan organisasi, karena ialah yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang kader-kader yang akan menjaga dan mengembangkan organisasi agar tetap utuh, adaptif dan produktif dalam menghadapi setiap tantangan dan menjawab setiap kebutuhan zaman.

Kaderisasi yang baik yaitu mampu menghadirkan sistem kaderisasi yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan setiap kader Kopri di berbagai wilayah. Proses kaderisasi tentu harus memperhatikan realitas sosial yang berkembang dan solutif terhadap perkembangan zaman. Dewasa ini Kopri dihadapkan pada kondisi yang fluktuatif, zaman dan kebiasaan berubah dengan cepat dan signifikan, hal demikian bukanlah situasi yang harus dihindari tetapi dihadapi dengan penuh kesiapan.

Kopri menghadapi tantangan situasi menuju era 5.0 yang mulai berbicara tentang komunitas yang digital, dalam waktu yang sama realitas juga masih berbicara bahwa masih banyak terjadi ketimpangan sosial terhadap perempuan, kemiskinan, pendidikan, kekerasan, kesehatan, strutur penindasan sistemik dalam bingkai budaya patriarki dan tafsir misoginis yang masih menjadi penghambat perempuan dalam menggali dan mengoptimalkan serta mengekspresikan segala potensi dirinya sebagai manusia.

Selain hal di atas Kopri juga menghadapi tantangan internal dimana mutu kaderisasi di berbagai wilayah Indonesia cenderung mengalami

perbedaan. Hal demikian terjadi karena perbedaan standarisasi dan evaluasi pelaksanaan kaderisasi dalam setiap jenjangnya baik kaderisasi formal (SIG, SKK, SKKN), non formal dan informal. Persoalan demikian tentu menjadi perhatian yang prioritas bagi Kopri PB PMII dalam ikhtiar membangun kader yang ulil albab sehingga terbentuknya Kopri yang mandiri dan maju.

Tantangan kehidupan, realitas sosial, dan kondisi objektif Kopri menjadi landasan bagi Bidang Kaderisasi Nasional Kopri PB PMII masa khidmat 2021-2024 untuk menghadirkan desain kaderisasi yang sistematis, berjenjang, terukur dan terarah dengan mengacu pada sistem kaderisasi multidimensi yang dimuat dalam Buku Pedoman Kaderisasi Kopri. Buku Pedoman Kaderisasi ini dibuat dalam upaya memberikan panduan pelaksanaan kaderisasi Kopri.

Jakarta, 04 Desember 2021

Penyusun,

Bidang Kaderisasi Nasional
KOPRI PB PMII 2021-2024

KATA PENGANTAR

Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) sebagai badan khusus PMII, selanjutnya disebut KOPRI PMII, merupakan lembaga yang sangat strategis dan fundamental dalam melakukan beragam ikhtiar mencapai tujuan membangun generasi muda perempuan yang berdaya saing tinggi, kapabel, dan membanggakan.

Sebagai salah satu alumni dan kader hingga saat ini, saya merasa KOPRI PMII merupakan organisasi pertama yang punya kontribusi dan peran signifikan sehingga membuat saya merasa menjadi perempuan seutuhnya hingga saat ini. Kader-kader lainnya tentunya juga akan merasakan hal yang sama. Sebab, saat di KOPRI PMII, kita semua digembleng untuk saling tepo-seliro, tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan organisasi dan kelangsungannya, memikirkan bagaimana mencari kader, memberdayakannya, hingga membuatnya menjadi perempuan muda yang bermanfaat dan cakap dalam menjalani kehidupannya.

Sebagai organisasi eksternal dengan kader yang sangat besar di Indonesia, harus diakui pasti tidaklah mudah mengurus sisi kaderisasinya. Inilah kunci penting hidup mati sebuah organisasi. Namun, dari sejak didirikan hingga saat ini, nyata terlihat bahwa sebenarnya KOPRI telah mengalami berbagai transformasi kelembagaan, baik secara organisasi, program-program kerjanya dari periode ke periode, hingga rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan dan berimplikasi luas terhadap aspek kehidupan mahasiswa, utamanya kelompok perempuan.

Agar visi-misi, tujuan, dan cita-cita besar KOPRI PMII mampu dicapai secara bersama-sama, maka secara organisasi, KOPRI harus mempersiapkan

kerapian, ketertiban, kesolidan, dan kekuatan internal yang mampu menjadi elemen pendukung utama dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Secara program kerja, KOPRI PMII seyogianya dan sudah seharusnya mampu adaptif, kreatif, inovatif, dan solutif mengusung agenda-agenda utamanya. Di tengah disrupsi peradaban, teknologi, hingga perubahan zaman yang cukup pesat, kreativitas dan inovasi merupakan hal utama agar KOPRI PMII mampu bersinergi dengan berbagai kelompok di tengah-tengah masyarakat, sekaligus beradaptasi denga perubahan-perubahan yang ada.

Dari sisi ikhtiar penguatan kaderisasi, KOPRI PMII juga dituntut adaptif dengan kondisi yang terjadi. Karena itu, poin mengenai konsep, metodologi, dan mekanisme kaderisasi tentu masih menjadi basis-basis utama yang cukup penting diperhatikan, dan harus terus diuji dari waktu ke waktu. Selain itu, dari sisi internal, perbaikan dan penyempurnaan tata kelola organisasi, aspek peraturan, sistem pengkaderannya, dan seterusnya, serta aspek eksternal yang meliputi banyak hal, mulai politik dan pemerintahan, isu ekonomi, perempuan, kebudayaan, dan lain-lain, tentu menjadi hal utama yang tidak boleh dilewati begitu saja.

Saya mengapresiasi terbitnya Buku Pedoman Kaderisasi KOPRI PMII yang monumental ini. Harapannya dapat menjadi panduan bagi seluruh struktur KOPRI di berbagai tingkatannya. Terbitnya Buku Pedoman ini menunjukkan bahwa KOPRI sangat serius mengelola kaderisasinya, agar cita-cita organisasi dapat tercapai dengan baik. Buku Pedoman Kaderisasi ini adalah formula sekaligus panduan bagi kepengurusan di periode saat ini, dan tentu diharapkan juga panduan utama kaderisasi di masa yang akan daatang.

Akhirul kalam, semoga apa yang menjadi niat baik kita bersama, dapat dikabulkan Allah SWT, dan menjadi kemanfaatan sekaligus rahmat bagi segenap kader KOPRI PMII di manapun di belahan bumi ini.

Anggia Erma Rini

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2019-20124
Ketua PP Fatayat NU 2015-2022
Ketua KOPRI cabang Kota Malang 1996-1997
Ketua Kaderisasi KOPRI PB PMII 1997-2000

BUNGA RAMPAI

Kopri sebagai ruang pengembangan kapasitas, kreativitas, dan inovasi harus bisa menjawab perkembangan yang saat ini berjalan. Kopri hadir sebagai lokomotif perjuangan perempuan di Indonesia. Kader Kopri harus senantiasa menguatkan dakwah di kalangan milenial dengan memanfaatkan platform digital. Kaderisasi yang produktif dan terarah merupakan konsep yang harus menjadi pedoman utama dalam proses pengkaderan. Penguatan kader secara intelektual, skill, dan kemandirian menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses kaderisasi.

Setiap masa memiliki pengalaman dan kondisi yang berbeda-beda maka penting untuk mereformulasikan kembali penyegaran sistem kaderisasi yang sesuai guna mengharapkan kondisi yang lebih baik. Hadirnya buku panduan kaderisasi Kopri menjadi semangat baru untuk Kopri dalam memperkuat keilmuan yang sejalan dengan visi "Kopri Mandiri dan Maju", Maju yang dimaksud adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang matang, berani dan bertanggung jawab, Mandiri adalah memiliki mental yang kuat, keilmuan yang mumpuni dan spiritual yang tinggi.

Transformasi kaderisasi multidimensi yang dirancang akan menjadi sistem baru untuk memperbaiki dan memaksimalkan potensi yang dimiliki seluruh kader Kopri. Transformasi kaderisasi multidimensi ini diambil untuk menjadi *role model* pembaharuan tata kelola kaderisasi yang diarahkan untuk memperkuat berbagai potensi kader. Dengan demikian tentu sistem pengkaderan harus terarah, terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, mengasah kepekaan, melatih sikap, memperkuat karakter, dan memperluas wawasan agar menjadi manusia

yang santun, terampil, cendekia, dan siap menjalankan roda organisasi untuk mencapai cita-cita perjuangan organisasi, agama, bangsa dan negara.

Terakhir kader Kopri harus tetap konsisten dalam mendakwahkan Islam *rahmatan lil alamiin*, Islam dengan wajah penuh cinta kasih dan kedamaian. Penguatan wawasan kebangsaan yang diiringi dengan semangat spiritual sangat perlu ditransformasikan kepada generasi milenial, khususnya perempuan. Kopri harus menjadi dinamisator gerakan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui buku pedoman kaderisasi yang dipersembahkan oleh Kopri PB PMII masa khidmat 2021-2024 diharapkan semua kader Kopri di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi penggerak. Buku Pedoman ini diharapkan dapat meretas keterbatasan Kopri di setiap Koordinator Cabang, Cabang, Komisariat, dan Rayon di suluruh Indonesia agar memiliki panduan yang tepat dan dapat menfasilitasi proses pengkaderan yang mampu mewujudkan Kopri yang mandiri dan maju.

Jakarta, 04 Desember 2021

Ketua Kopri PB PMII 2021-2024

Maya Muizatil Lutfillah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENYUSUN .... **vii**

KATA PENGANTAR.. **ix**

BUNGA RAMPAI .... **xi**

DAFTAR ISI .... **xiii**

BAB I
LANDASAN BUKU PEDOMAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Sistematika.. 3

BAB II
LANDASAN FORMULASI **7**

A. Landasan Islam Aswaja An-Nahdhiyyah.. 7

B. Landasan Filosofis Kopri 22

BAB III
SISTEM KADERISASI KOPRI **46**

A. Pandangan Umum Kaderisasi.. 46

B. Konsep Kaderisasi 49

C. Metodologi Kaderisasi Formal.. 51

D. Mekanisme Kaderisasi 53

BAB I
LANDASAN BUKU PEDOMAN

A. Latar Belakang

KOPRI sebagai bagian dari PMII merupakan organisasi di bidang eksternal kemahasiswaan yang merawat sistem kaderisasi dan terbesar di Indonesia, sudah menjadi kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu ruang gerak dalam pengembangan kader perempuan PMII serta sesuai dengan tujuan PMII yang termaktub dalam Anggaran Dasar PMII yang berbunyi:

> *"Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudai luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memeperjuangkan cita cita kemerdekaan Indonesia"*

KOPRI diharapkan mampu membangun kemandirian dalam pemikiran dan sikap di tengah peliknya persoalan sosial dan masyarakat. Dengan landasan dan ideologi yang kuat serta diiringi dengan tujuan luhur dapat menjadikan kader KOPRI memiliki kesadaran dan semangat membangun diri dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan nilai- nilai yang tertuang dalam ideologi, cita cita dan visi KOPRI yaitu "Kopri Mandiri dan Maju".

Realita perkembangan proses kaderisasi saat ini tentu harus terus diperbaiki dengan melakukan evaluasi guna menghasilakan tatakelola organisasi yang baik dan komprehensif, baik secara struktural kelembagaan

dan sitematika pengkaderan sesuai yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) pada BAB III tentang strategi Pengembangan KOPRI poin B.1 yang berbunyi: rendahnya minat kader putri PMII yang memiliki basis pengetahuan yang ilmiah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kurangnya sosialisasi yang berkaitan dengan KOPRI sehingga tidak ada kepemilikan KOPRI. Serta poin B.2 yang berbunyi: Tidak ada acuan atau panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi. Hal ini megakibatkan kaderisasi KOPRI yang belum tersistematis dan belum ada panduan yang jelas terkait pelaksanaan penyelenggaraan KOPRI.

Kompleksitas persoalan KOPRI dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain kesiapan SDM kader perempuan yang belum mampu mengimbangi pesatnya kemajuan organisasi. Hal ini bisa kita lihat dari rendahnya rasa percaya diri, lemahnya rasa kepemilikan (*sense of belonging*), lemahnya komitmen yang memepengaruhi totalitas yang dimiliki pengurus mupun kader. Hal tersebut berangkat dari pengalaman tim kaderisasi dalam mengawal proses berjalannya kaderisasi, baik tingkat nasional sampai tingkat rayon.

Pada kenyataannya pemahaman tentang KOPRI belum bisa dipahami secara menyeluruh dan masih sangat minimnya pengetahuan tentang gerakan perempuan membuktikan kurangnya distribusi pengetahuan pola dan system kaderisasi yang didukung dengan belum tersambungkannya garis koordinasi yang baik secara hirarki organisasi KOPRI, baik komunikasi *top down* maupun *button up*. Seyogyanya KOPRI hari ini harus memiliki strategi managemen kaderisasi yang tepat dan berkelanjutan dalam mewujudkan arah gerak perjuangan di tengah banyaknya tantangan dan peluang bagi kader perempuan.

Untuk menjawab beberapa faktor problematika kaderisasi tersebut di atas maka, Tim kaderisasi KOPRI PB PMII periode 2021-2024 berupaya mengumpulkan hasil analisa pemikiran bersama yang dituangkan dalam bentuk buku pedoman sebagai bahan acuan dalam menjalankan proses kaderisasi pada setiap level kaderisasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Buku pedoman kaderisasi KOPRI ini dibuat untuk memberikan acuan dan pedoman pelaksanaan kaderisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan jenjang kaderisasi dan meningkatkan skill keorganisasian terhadap SDM pengurus dan kader

2. Tujuan

Buku pedoman kaderisasi KOPRI ini memiliki tujuan:

a. Memberikan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan jenjang kaderisasi yang dilaksanakan di tingkat Rayon, Komisariat, Cabang, PKC hingga PB.

b. Menumbuhkan minat dan komitmen pengurus dan kader untuk meneruskan proses ke jenjang kepengurusan yang lebih tinggi.

c. Mereformulasi pola kaderisasi dan format pelatihan untuk meningkatkan skill organiasi pengurus dan kader.

d. Menciptakan sistematika kaderisasi KOPRI

e. Meningkatkan upaya sosisalisasi KOPRI untuk memperkuat *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap KOPRI.

C. Sistematika

1. Pendaftaran

Mekanisme awal dalam sebuah pelatihan adalah pendaftaran dan wajib dikuti oleh seluruh peserta meliputi berkas administrasi yang sesuai aturan Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI (PPPK) KOPRI dan kondisi di masing-masing wilayah. Pada proses pendaftaran panitia akan mendata peserta sehingga pada tahapan pendaftaran dapat diketahui jumlah peserta yang sudah memenuhin pesyaratan untuk mengikuti kegiatan. Proses pendaftaran dalam pelaksanaan kaderisasi disesuaikan dengan kondisi wilayah penyelenggara dapat dilakukan secara online ataupun offline.

2. *Screening*

Screening merupakan tahapan setelah pendaftaran, ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami dan menguasai materi-materi yang telah didapatkan selama mengikuti proses kaderisasi yang ada di PMII maupun KOPRI sebelumnya.

Selain itu proses ini juga akan memberikan gambaran kepada penyelenggara dari titik mana akan dimulai penguatan kapasitas kader melalui proses kaderisasi, kondisi peserta akan menjadi titik langkah awal yang harus terkonfirmasi pada fasilitator atau instruktur karena perlu diakui bahwa masih ada kesenjangan pengetahuan. Dengan adanya *screening* kita juga akan mengetahui potensi apa yang dimiliki masing-masing peserta pelatihan.

Screening kaderisasi Formal sebagai berikut:

a. Sekolah Islam dan Gender (SIG)

1) Screening Berkas
    a) Formulir dan CV
    b) Surat rekomendasi Pengurus Kopri Rayon/ Pengurus Kopri Komisariat dan/atau Pengurus Kopri Cabang
    c) Sertifikat MAPABA
    d) Membuat Essay
2) Wawancara
    a) Pengetahuan tentang PMII, Kopri dan Gender
    b. Sekolah Kader Kopri (SKK)
1) Screening Berkas
    a) Formulir dan CV
    b) Surat Rekomendasi dari Pengurus Kopri Komisariat atau Pengurus Kopri Cabang diketahui oleh Ketua Kopri Komisariat atau Ketua Kopri Cabang asal.
    c) Sertifikat SIG dan PKD
    d) Membuat makalah dengan pilihan tema tentang:
        - Strategi pengembangan Kopri di fakultas, kampus dan cabang yang masih sangat minim Koprinya
        - Al-Qur'an dan Hadits perspektif Keadilan Gender
2) Wawancara
    a) Presentasi Makalah
    b) Tes lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan citra diri KOPRI
    c) Motivasi mengikuti SKK

c. Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN)
    1) Screening Berkas
        a) Formulir dan CV
        b) Surat rekomendasi dari Pengurus Kopri Cabang dan/atau Pengurus Kopri PKC dan/atau Pengurus Kopri PB diketahui oleh Ketua Kopri PMII di masing-masing level
        c) Sertfikat SKK dan PKL
        d) Catatan tentang kondisi Kopri di daerah masing-masing dari level Kopri Cabang dan Kopi PKC

e) Membuat makalah dengan pilihan tema:
   - Arah gerakan KOPRI Internal dan Eksternal
   - Strategi gerakan perempuan dalam penguasaan ruang public
   - Strategi membaca peluang di berbagai Sektor

2) Wawancara
   a) Presentasi makalah
   b) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti secara keseluruhan
   c) Orientasi mengikuti SKKN

3. Kontrak Belajar

Dalam melakukan proses kaderisasi penting untuk membuat kontrak belajar dari hasil kesepakatan bersama forum. Perlu diketahui, dalam kegiatan pelatihan bukan hanya kerja sama antara pembicara dan peserta saja yang menjadi poin penting akan tetapi interaksi antara sesama peserta, panitia maupun fasilitator harus saling menjaga dan saling memahami satu sama lainnya. Sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung pun ikut memberikan peranan dalam keberhasilan belajar siswa. Peraturan yang dibuat dan disepakati bersama supaya kegiatan berjalan secara tertib, arena proses kaderisasi yang dilakukan untuk mampu mencetak kader-kader yang berkualitas dan calon-calon pemimpin yang profesional. Maka dari itu pentingnya kontrak belajar ini dibuat supaya peserta melatih diri untuk mengikuti dan tata tertib terhadap aturan sehingga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Bersama.

4. Pengarahan

Dalam setiap kegiatan peserta terlebih dahulu diberikan arahan, karena sebelum berjalannya sebuah kegiatan adalah hal yang sangat perlu untuk diadakan hal ini ditujukan supaya seluruh peserta dapat memahami dan mematuhi seluruh proses selama kegiatan dilaksanakan.

Pengarahan teknis dapat diberikan oleh panitia penyelenggara, pengarahan pelaksanaan dan aturan main kegiatan dapat diberikan oleh fasilitator.

5. Pelatihan / Pelaksanaan Kegiatan Kaderisasi

Pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan inti dalam setiap proses kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi membutuhkan *support* dari panitia

pelaksana, peserta dan fasilitator/instruktur serta pemateri.

Panitia pelaksana mengupayakan semua proses kegiatan kaderisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peserta mengikuti setiap aturan kegiatan yang telah disepakati, dan fasilitator/instruktur bertanggung jawab dalam memamdu terlaksananya proses kaderisasi dan memastikan bahwa proses kaderisasi mewujudkan adanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi peserta. Fasilitator/instruktur memastikan bahwa setiap materi yang disampaikan pemateri sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang seharusnya diterima oleh peserta dan *membackup* jika diperlukan.

Proses kaderisasi harus menambah keilmuan dan intelektualitas, menambah pengalaman dan meningkatkan skil serta ketrampilan-ketrampilan hingga mempunyai kepercayaan diri dan mampu berprestasi ketika memimpin kelak. Dari pelatihan (SIG, SKK dan SKKN) dilakukan dan sengaja diadakan untuk meningkatkan kualitas SDM kader, dengan penguatan pelatihan-pelatihan non-formal yang menjadi pendukung. Untuk mencetak kader pemimpin, pengarahan tidaklah cukup, perlu ada pelatihan-pelatihan atau praktek di lapangan.

6. Review dan Evaluasi

Dalam setiap pelaksanaan kaderisasi, seluruh peserta harus mengikuti tahapan kegiatan sampai akhir termasuk review atau evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kader memahami dengan materi-materi yang peserta terima selama pelatihan. Peserta diberikan tugas untuk mereview materi-materi yang telah disampaikan dan serahkan kepada instruktur atau fasilitator.

7. Penugasan

Penugasan diberikan pada peserta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Rayon, Komisariat, Cabang dan PKC masing-masing, dan penugasan wajib tentunya melaksanakan pelatihan formal dan informal.

BAB II
LANDASAN FORMULASI

A. Landasan Islam Aswaja An-Nahdhiyyah

1. ASWAJA dan Citra Islam di Dunia

Pasca peristiwa tragedi WTC 11 September 2001 di New York dan seruan peperangan terhadap terorisme, komunitas Islam seolah-olah menjadi bagian isu penting untuk selalu dibicarakan. Komunitas Islam dipandang sebagai penyebab segala permasalahan dan secara stereotip mereka menjadi sasaran tuduhan tersebut.[1] Dunia juga diresahkan dengan adanya gerakan radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Timur Tengah dan kelompok Boko Haram di Afrika. Kelompok yang sama-sama mengatasnamakan Islam sebagai pembenar dan melakukan tindakan kekerasan yang telah mereka lakukan. Kelompok ini bertujuan untuk berdirinya kembali pemerintahan yang berasaskan ajaran Islam. Tindakan kelompok radikal ISIS dan Boko Haram tentu merusak citra positif Islam dan umat Islam dunia. Islamophobia pun bermunculan di berbagai negara, terutama negara yang mayoritas berpenduduk nonmuslim.[2]

Tentu hal ini berbanding terbalik dengan Citra *Islam yang Rahmatan Lil Alamin* yang penuh dengan kasih sayang, seolah-olah sudah berubah menjadi Islam yang menakutkan. Citra Islam ramah telah dibangun selama berabad-abad lamanya, sekarang berubah signifikan karena hanya ulah Sebagian orang/

1 Islamophobia dan strategi mengatasinya, Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004 hal. 1

2 https://mediaindonesia.com/opini/1502/mengembalikan-citra-islam

kelompok. Tantangan kita saat ini sebagian muslim ialah mengembalikan citra Islam ke aslinya. Kita sebagai umat Islam punya tanggung jawab untuk mengembalikan citra Islam ke *Rahmatan Lil Alamin* seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam datang dengan membawa kedamaian, keadilan dan penegakan aturan yang diharapkan akan membawa ke dalam tatanan masyarakat yang lebih baik. Islam mengajarkan kedamaian kepada semua golongan, kecuali kepada pihak yang mengganggu dan menghalangi umat Islam untuk melaksanakan aturan-aturan Islam. Pandangan yang terbuka terhadap Islam perlu dibangun dan pandangan yang tertutup perlu diminimalisir, tentu saja hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan bila pandangan yang tertutup telah diinternalisasi oleh sebagian anggota masyarakat.

Nahdlatul Ulama meneguhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) untuk mengatasi radikalisme di dunia.[3] Aswaja bisa menjadi solusi dan ikon perdamaian dunia. Dengan berlandaskan pada sikap-sikap *tawassuth, tawazun, tasamuh dan i'tidal*, maka keragaman pemahaman dan praktik keagamaan yang menjadi mozaik dari kaum Sunni di berbagai negeri akan dapat meregenerasi ikatan-ikatan sosial itu, dan memperkuat tidak saja persaudaraan seagama (*ukhuwwah Islamiyyah*) tetapi juga persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*). Aswaja tidak saja muncul sebagai ikatan keagamaan, tapi juga ikatan sosial baru.

KOPRI melihat bahwa Aswaja merupakan pilihan paling tepat di tengah kenyataan masyarakat kepulauan Indonesia yang beragam dalam etnis, budaya dan agama. KOPRI melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman, Aswaja menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan bagi pengamalnya untuk menciptakan ruang kreatifitas dan menelurkan ikhtiar-ikhtiar baru untuk menjawab perkembangan zaman. Bagi KOPRI, Aswaja juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna bagi setiap tempat dan zaman. Islam tidak diturunkan untuk sebuah masa dan tempat tertentu. Kehadirannya dibutuhkan sepanjang masa dan akan selalu relevan. Namun relevansi dan makna tersebut sangat tergantung kepada kita, pemeluk dan penganutnya, memperlakukan dan mengamalkan Islam.

Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) yang merupakan bagian integral dari sistem keorganisasian PMII. Dalam NDP (Nilai Dasar Pergerakan) disebutkan bahwa Aswaja merupakan metode pemahaman dan pengamalan keyakinan Tauhid. Lebih dari itu, disadari atau tidak Aswaja merupakan

3 https://nu.or.id/opini/aswaja-berparadigma-global-htMoZ

bagian kehidupan sehari-hari setiap anggota/kader organisasi kita. Akarnya tertanam dalam pada pemahaman dan perilaku penghayatan kita masing-masing dalam menjalankan Islam.[4]

2. Sejarah Lahirnya *Ahlusunnah Waljama'ah* (ASWAJA)

Konflik dalam Islam mempengaruhi sejarah kemunculan istilah Aswaja sebagai sebuah nama firqah (sekte) Islam. Episode perpecahan dalam tubuh Islam dimulai sejak peristiwa pembunuhan khalifah Islam ketiga, Utsman bin Affan, persoalan kalam dipicu oleh persoalan politik.

Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Qur'an apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara Sifat-Sifat Allah antara ulama Salafiyyun dengan golongan Mu'tazilah, dan seterusnya.

Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja terentang hingga zaman al-khulafa' ar-rasyidun, yakni dimulai sejak terjadi Perang Shiffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dengan Muawiyah. Bersama kekalahan Khalifah keempat tersebut, setelah dikelabui melalui taktik arbitrase (*tahkim*) oleh kubu Muawiyah, ummat Islam makin terpecah ke dalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syi'ah yang secara umum dinisbatkan kepada pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib, golongan Khawarij yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan tahkim, dan ada pula kelompok Murjiah yang melegitimasi kepemimpinan Muawiyah. Selain tiga golongan tersebut masih ada Qadariah, faham bahwa segala sesuatu yang terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur (*af'al al-ibad min al-ibad*) berlawanan dengan faham Jabariyah.

Diantara kelompok-kelompok itu, adalah sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan ibn Hasan Yasar al-Bashri (21-110 H/639-728 M), lebih dikenal dengan nama Imam Hasan al-Bashri, yang cenderung mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural *(tsaqafiyah*), ilmiah dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai faksi politik (*firqah*) yang berkembang ketika itu. Sebaliknya mereka mengembangkan sistem keberagamaan dan pemikiran yang sejuk, moderat dan tidak ekstrim.[5] Dengan sistem keberagamaan semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian

4 Nur Sayyid Santoso Kristeva, S.Pd.I., M.A. *Sejarah Teologi Islamdan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah*,2012, Hlm 159

5 Khazanah Aswaja, Tim Aswaja Nu Center PWN Jawa Timur, 2016,hal 18-40

politik. Dalam situasi yang menegangkan kelompok ini kemudian menjadi dinamisator dan penengah bagi kebingungan masyarakat dalam menentukan sikap keagamaanya, kelompok inilah yang kemudian disebut *Ahlusunnah wal jamaah* (Aswaja).

Seiring waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi Ulama setelah beliau, di antaranya Imam Abu Hanifah Al-Nu'man (w. 150 H), Imam Malik Ibn Anas (w. 179 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), Ibn Kullab (w. 204 H), Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H), hingga tiba pada generasi

Abu Hasan Al-Asy'ari (w 324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H). Dalam menghadapi kedua faham yang sama-sama ekstrim tersebut, Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (W.324 H) dan Imam Abu Manshur al-Maturidi (W. 333 H) merasa berkewajiban untuk meluruskan kedua kelompok tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Mereka berdua memunculkan kembali pola pikir yang mengambil jalan tengah antara kedua faham teologi yang ekstrim (syiah dan khawarij) yaitu dengan menghadirkan *Ahlusunnah wal jama'ah*. Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan faham Aswaja sering dinisbatkan meskipun bila ditelusuri secara teliti benih-benihnya telah tumbuh sejak dua abad sebelumnya.

Aswaja sebagai aliran pemahaman teologis (Aqidah) Islam berusaha mengatasi suatu faham ekstrim yang lain, yang berlawanan faham secara total dengan kaum Mu'tazilah, yaitu faham kaum Jabariyah di mana mereka berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan atau kuasa dalam berkehendak dan berbuat. Kehendak (*iradah*) dan perbuatan manusia terikat dengan kehendak mutlak Tuhan. Jadi segala perbuatan manusia itu dilakukan dalam keadaan terpaksa (mujbar). Mereka akhirnya befikir fatalistic. Kelompok ini cenderung berfikir skriptualistik sementara kelompok Mu'tazilah berfikir rasionalistik. Aswaja ini tidak mengecam Jabariyah, Qodariyah maupun Mu'tazilah akan tetapi berada di tengah-tengah dengan mengembalikan pada *ma anna alaihi wa ashabihi.*

a. Pengertian ASWAJA

Secara semantik arti *Ahlussunnah wal jama'ah* adalah sebagai berikut. *Ahl* berarti pemeluk, jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab maka artinya adalah pengikut aliran atau pengikut madzhab (*ashab al-madzhab*). *Al-Sunnah* mempunyai arti jalan, di samping memiliki arti al-Hadist. Disambungkan dengan *ahl* keduanya bermakna pengikut jalan Nabi, para Sahabat dan tabi'in. Al-Jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Bila dimaknai

secara kebahasaan, *Ahlusunnah wal Jama'ah* berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat dan tabi'in.

Nahdlatul 'Ulama merupakan ormas Islam pertama di Indonesia yang menegaskan diri berfaham Aswaja. Dalam Qanun Asasi (konstitusi dasar) yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari juga tidak disebutkan definisi Aswaja. Namun tertulis di dalam Qanun tersebut bahwa Aswaja merupakan sebuah faham keagamaan dimana dalam bidang akidah menganut pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dalam bidang fiqh menganut pendapat dari salah satu madzhab empat (madzahibul arba'ah – Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali), dan dalam bidang tasawuf/ akhlak menganut Imam Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.

Selama kurun waktu berdirinya (1926) hingga sekitar tahun 1994, pengertian Aswaja tersebut bertahan di tubuh Nahdlatul Ulama. Baru pada sekitar pertengahan dekade 1990 tersebut, muncul gugatan yang mempertanyakan, tepatkah Aswaja dianut sebagai madzhab, atau lebih tepat dipergunakan dengan cara lain? Aswaja sebagai madzhab artinya seluruh penganut Aswaja menggunakan produk hukum atau pandangan para Ulama dimaksud. Pengertian ini dipandang sudah tidak lagi relevan lagi dengan perkembangan zaman mengingat perkembangan situasi yang berjalan dengan sangat cepat dan membutuhkan inovasi baru untuk menghadapinya. Selain itu, pertanyaan epistimologis terhadap pengertian itu adalah, bagaimana mungkin terdapat madzhab di dalam madzhab.

Dua gugatan tersebut dan banyak lagi yang lain, baik dari tinjauan sejarah, doktrin maupun metodologi, yang menghasilkan kesimpulan bahwa Aswaja tidak lagi dapat diikuti sebagai madzhab. Lebih dari itu, Aswaja harus diperlakukan sebagai manhaj al-fikr atau metode berpikir.

b. ASWAJA Sebagai Manhaj Al-Fikr

Selama ini proses reformulasi Aswaja telah berjalan, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Tahun 1994, dimotori oleh KH. Said Agil Siraj muncul gugatan terhadap Aswaja yang sampai saat itu diperlakukan sebagai sebuah madzhab. Padahal di dalam Aswaja terdapat berbagai madzhab, khususnya dalam bidang fiqh. Selain itu, gugatan muncul melihat perkembangan zaman yang sangat cepat dan membutuhkan respon yang kontekstual dan cepat pula. Dari latar belakang tersebut dan dari penelusuran terhadap bangunan isi Aswaja sebagaimana selama ini digunakan, lahirlah gagasan *ahlussunnah wal-jama'ah* sebagai manhaj al-fikr (metode berpikir).[6]

6 Said Agil Siradj, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Hlm 410-413

Di dalam tubuh PMII Aswaja dijadikan Manhajul Fikri artinya Aswaja bukan dijadikan tujuan dalam beragama melainkan dijadikan metode dalam berfikir untuk mencapai kebenaran agama. Walaupun banyak tokoh yang telah mencoba mendekontruksi isi atau konsep yang ada dalam aswaja tapi sampai sekarang Aswaja dalam sebuah metode berfikir ada banyak relevansinya dalam kehidupan beragama, sehingga PMII lebih terbuka dalam membuka ruang dialektika dengan siapapun dan kelompok apapun. PMII memandang bahwa Aswaja adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran. Aswaja bukan sebuah madzhab melainkan sebuah metode dan prinsip berpikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial-kemasyarakatan; inilah makna Aswaja sebagai *manhaj al-fikr*.

c. Prinsip ASWAJA Sebagai Manhaj

Adapun ciri aswaja yaitu secara tauhid mengikuti imam abu hasan alasy'ari dan imam abu mashur Al-maturidi. Secara Fiqih mengikuti empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dan secara tasawuf mengikuti imam al-ghazali dan al-Junaidi yang kesemuanya pola pikirnya adalah *tawasuth, tasamuh*, *tawazun*, atau *ta'adul,* dan menjaga amaliyah para sahabat Nabi. Kemudian lahirlah paham tengahtengah *Ahlussunah wal Jama'ah*, konteksnya kembali pada semanagat awal Islam *ma anna alaihi wa ashabihi* yang dipelopori oleh dua ulama besar pada waktu itu Abu Hasan Al Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi, ini dalam bidang teologi/tauhid.

Kemudian dalam bidang Fiqih lahirlah ulama-ulama besar yang merumuskan fiqih dengan mendasarkan kepada Ahlussunah, artinya kepada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dan para Sahabat kemudian lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali), kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal inilah yang merupakan korban dari kekuasaan Bani Abassiyah ketika mengharuskan warganya menggunakan aliran yang dikembangkan oleh Mu'tazilah dalam bidang Fiqih. Dan masih banyak imamimam yang lain tetapi yang paling kita kenal adalah ini, yang kita sebut dengan empat madzhab.

Sehingga orang Aswaja sering dikatakan: "orang Islam yang secara teologi mengikuti ijthad Abu Hasan Al Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dan secara Fiqih mengikuti ijtihad salah satu madzhab yang empat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Maliki kemudian dalam bidang tasawuf mengikuti ijtihad ulama besar Imam Al Ghazali. Berikut

ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keilmuan, Aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.[7]

1) Bidang Keilmuan

Pada dasarnya sumber ilmu pengetahuan itu adalah ayat qouliyah dan ayat kauniyah. Dalam bidang keilmuan yang menjadi epistemologi ilmu dalam Aswaja sandarannya adalah Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78 dan Al-Qur'an surat al-Isra ayat 36, dari ayat ayat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa manusia itu memiliki dua potensi. Pertama, potensi alat pencari data/dalil, yaitu al-Sam'a dan al-Abshor. Kedua, potensi alat pengolah data/dalil yaitu alAfidah. Dengan dua potensi yang dimiliki itu, memungkinkan manusia untuk melakukan penggalian ilmu secara lebih mendalam. Prinsip Aswaja dalam bidang keilmuan ini sangat penting dan harus lebih dahulu dari prinsip lainnya, sebagaimana ijma' (konsensus) ulama Aswaja karangan al-Baghdadi, terlebih di Aswaja ada doktrin tentang iman, dimana iman itu ada iman 'ala ilmin (Imam atas dasar ilmu) dan iman 'ala taqlidin (Iman atas dasar taqlid). Sebab keilmuan ini akan menopang seluruh aspek terutama berkaitan dengan kualitas hidup dan kehidupan, sebagaimana dalam AlQur'an surat Al-Mujadilah ayat 11: niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Bidang Aqidah

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah *Ahlussunnah wal-Jama'ah* diantaranya yang pertama adalah aqidah Uluhiyyah (Ketuhanan), berkait dengan ikhwal eksistensi Allah SWT. Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai Esksitensi sifat dan asma Allah SWT. Dimana terjadi diskursus terkait masalah apakah Asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (ism) bukanlah yang dinamai (musamma), Sifat bukanlah yang disifati (mausuf), sifat bukanlah dzat. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (Asma') Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya.

Aswaja menekankan bahwa pilar utama ke-Imanan manusia

7 PMII, *Manhaj al-fikr li A-hl Ahlusunnah Waljamaah*, hlm 14-20

adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap Muslim bahwa Allah-lah yang Menciptakan, Memelihara dan Mematikan kehidupan semesta alam. Ia Esa, tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah Nubuwwat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rosul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan ummat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam doktrin Nubuwwat ini, ummat manusia harus meyakini dengan sepebuhnya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, yang membawa risalah (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah Rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang ketiga adalah Al-Ma'ad, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (yaumul jaza'). Dan mereka semua akan dihitung (hisab) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

3) Bidang Sosial Politik

Berbeda dengan golongan Syi'ah yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara (imamah), *Ahlussunnah wal-jama'ah* dan golongan sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif (fardhu kifayah). Pandangan Syi'ah tersebut juga berbeda dengan golongan Khawarij yang membolehkan komunitas berdiri tanpa imamah apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi *ahlussunnah wal jama'ah*, negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemashlahatan bersama (mashlahah musytarakah).

Aswaja tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negara modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu

adalah:

a) Prinsip Syura (Musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut:

"*Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya* kepada *Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.*" (QS Al-Syura, 42: 36-39).

b) Prinsip Al-'Adl (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu Perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tidak *boleh* dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Berikut ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan.

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*" (QS An-Nisa, 4: 58).

c) Prinsip Al-Hurriyyah (Kebebasan)

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya.

Kebebasan *tersebut* wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari'ah dikenal dengan AlUshulul-Khams (prinsip yang

lima), yaitu:

Hifzhu al-Nafs (menjaga jiwa), adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk *menjamin* kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.

Hifzhu al-Din (menjaga agama), adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan Agama dan *Kepercayaannya*. Negara tidak berhak memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.

Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda), adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin *keamanan* harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.

Hifzhu al-Nasl, bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, *identitas*, garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mangunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. Hifzhu al-Nasl berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.

Hifzh al-'Irdh, jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena *profesi* dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Al-Ushulul Khams identik dengan konsep Hak Azazi Manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern bahkan mungkin di kalangan ahlussunnah wal-jama'ah. Lima pokok atau prinsip di atas menjadi ukuran baku bagi legitimasi sebuah kepemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kelak kemudian hari.

d) Prinsip Al-Musawah (Kesetaraan Derajat)

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan mausia lain, bangsa dengan bangsa yang lain

tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujuraat disebutkan:

"*Hai manusia,* Sesungguhnya *Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*". (Al-Hujuraat, 49: 13).

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Al-Maidah; 5: 48)

Dalam sebuah negara kedudukan warga negara adalah sama. Orang yang menjabat di tubuh pemerintahan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk mengayomi, melayani dan menjamin kemaslahatan bersama, dan tidak ada *privilege* (keistimewaan) khususnya di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi dan jabatan politik.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin Negara Islam,

Formalisasi Syari'at Islam dan Khilafah Islamiyah bagi *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Sebagaimana pun tidak didapati perintah dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk

mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya diharuskan untuk menjamin agar sebuah pemerintahan baik negara maupun kerajaan harus mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

4) Bidang Istinbath Al-Hukm (Pengambilan Hukum Syari'ah)

Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah Ijma'Qiyas. Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum (istinbath al-hukm) tidak dibantah oleh semua madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum naqli posisinya tidak diragukan. AlQur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam.

Sementara As-Sunnah meliputi al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para Sahabat dan Tabi'in. Penempatannya ialah setelah proses istinbath al-hukm tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an.

As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus (mutawatir), terkenal (masyhur) ataupun terisolir (ahad). Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh Ijma' Shahabah. Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, Ijma' adalah Kesepakatan kelompok legislatif (ahl al-halli wa al-aqdi) dan ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari ummat Muhammada pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.

Dalam Al-Qur'an dasar Ijma' terdapat dalam QS An-Nisa', 4: 115 "Dan barang siapa menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." Dan "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia." QS AlBaqarah, 2: 143.

Qiyas, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil ijtihad para Ulama. Qiyas yaitu mempertemukan sesuatu

yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan 'illat hukum. Qiyas sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi'i.

5) Bidang Tasawuf

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan "Tasawuf artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya, Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apa pun." Imam Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali menjelaskan Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah. Disimpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di Jalan Allah, dan perilaku mereka adalah perilaku yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun kata Imam Al-Junaid, lalu menyucikan hati dari apa saja selain Allah. Mereka (kaum Sufi) telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah, kata Imam Al-Ghazali. Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya. Ketidakterikatan kepada apapun selain Allah SWT adalah proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama keterlibatan kita di dalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi. Zuhud harus dimaknai sebagai ikhtiar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Mengapa? karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai Hamba dan fungsinya sebagai Khalifah harus diwujudkan.

Banyak contoh sufi atau ahli tasawuf yang telah zuhud namun juga sukses dalam ukuran duniawi. Kita lihat saja Imam Al-Junaid adalah adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sukses sebagai pengusaha tenun, Umar Ibn Abd Aziz adalah seorang sufi yang sukses sebagai pemimpin negara, Abu Sa'id Al Kharraj sukses sebagai pengusaha konveksi, Abu Hasan al-Syadzily sukses sebagai petani, dan Fariduddin al-Atthar sukses sebagai pengusaha parfum. Mereka adalah sufi yang pada maqomnya tidak lagi terikat dengan urusan duniawi tanpa meninggalkan urusan duniawi.

Urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah seperti mencari nafkah (pekerjaan), kemudian berbuntut pada urusan lain seperti politik. Dari urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi, politik-kekuasaan, hukum, persoalan sosial dan budaya. Dalam Tasawuf urusan-urusan tersebut tidak harus ditinggalkan untuk mencapai zuhud, justru kita mesti menekuni kenyataan duniawi secara total sementara hati/batin kita dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan itu. Di situlah zuhud kita maknai, yakni zuhud di dalam batin sementara aktivitas sehari-hari kita tetap diarahkan untuk mendarmabaktikan segenap potensi manusia bagi terwujudnya masyarakat yang baik.

d. ASWAJA Sebagai Ciri Khas Gerakan Kopri

Di era yang penuh dengan muskilat, Aswaja tampil sebagai faham yang mampu mengatasi pertikaian antar golongan, dan menjawab tantang keagamaan yang dihadapkan pada multikultural, dan multi pemikiran. Dengannya diharapkan tercipta kedamaian di dunia. Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah terbesar di dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut madzhab Syafi'i, dan sebagian terbesarnya tergabung, baik tergabung secara sadar maupun tidak dalam jam'iyyah Nahdlatul 'Ulama, yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlussunnah wal-Jama'ah.

Aswaja sebagai *manhaj al fikr* bersifat dinamis dan sangat terbuka bagi pembaruan-pembaruan. Sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan, dalam makna tertentu ia tidak dapat disamakan dengan metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namun demikian dalam ruang akademis pembaharuan atau perubahan sangat mungkin terjadi. Berangkat dari pola pendekatan pemahaman Aswaja perspektif *manhaj Al-Fikr* yang paling penting dalam memahami Aswaja adalah menangkap makna dari latar belakang yang mendasari tingkah laku dalam ber-Islam, bernegara dan bermasyarakat. Dalam karakter yang demikian inilah KH. Ahmad Sidiq (Al-Magfurlah) telah merumuskan karakter Aswaja kedalam tiga sikap, yakni;

Tawasut, I'tidal dan Tawazun (Pertengahan, Tegak Lurus dan Keseimbangan). Ketiga inilah yang menjadi landasan atas kerangka mensikapi permasalahan-permasalahan keagamaandan politik mempunyai kerangka berpikir, bersikap dan bertindak sesuai ASWAJA yang dikawal oleh KOPRI, sehingga memilah bagaimana konsep memperjuangkan kesetaraan perempuan

yang bersikap moderat sehingga tidak terlalu kolot dengan pemikiran tekstual serta tidak terlalu liberal dalam interpretasi kesetaraan perempuan. Mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian antara pandangan feminism dengan pandangan keagamaan aswaja.

Kopri dalam narasi pemikiran dan gerakan selalu berpegangan pada prinsip Al 'adalah atau keadilan, Kopri meyakini bahwa setiap manusia baik dengan kelamin perempuan atau laki-laki berhak atas hidup yang adil. Memperoleh keadilan sebagai insan individu yang bebas dan sadar mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh diri kita, memperoleh keadilan sebagai ummat islam dalam mengekspresikan segala pengetahuan yang dimiliki untuk bersama menjalankan perintah Allah SWT sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Memperoleh keadilan sebagai warga Negara untuk dapat hidup yang aman dan nyaman tanpa memperoleh diskriminasi, stereotype negative, subordinasi dan pelemahan-pelemahan lainnya.

Narasi gerakan Kopri berikutnya memperjuangkan *prinsip Al musawah (kesetaraan) dan Al huriyyah* (kemerdekaan / Kebebasan) dan Al adalah (keadilan). Prinsip Aswaja ini meneguhkan bahwa setiap manusia berhak memperoleh sikap yang setara dan berhak memperjuangkan kemerdekaan dirinya dari hegemoni budaya yang memonopoli ruang gerak dan ekspresi manusia. Aswaja menegaskan bahwa manusia termasuk perempuan berhak terbebas dari penindasan baik penindasan sistemik ataupun budaya. Tidak boleh ada satu jenis kelaminpun yang ditinggikan derajatnya melainkan semuanya sama.

Maka dengan berpegang teguh pada prinsip aswaja tersebut Kopri dengan tegas memperjuangkan nilai-nilai keadilan kesetaraan dan kemanusiaan bagi perempuan. Nilai-nilai tersebut dengan tegas diperjuangkan karena kita secara sadar harus mengakui bahwa perempuan masih dalam bingkai dan bayang-bayang paradigma kehidupan yang sangat patriarkis. Tentu ini memberikan efek domino pada kehidupan perempuan. Corak hidup yang patriarki ini setidaknya menghasilkan cara pandangan yang bias terhadap gender manusia.

Setidaknya bias gender ini kemudian memanifestasikan ketidakadilan bagi perempuan diantaranya subordinasi; penomorduaan perempuan dalam aspek kehidupan baik dalam ranah domestik dan publik tentu menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan potensi alamiah perempuan dalam dirinya. Marginalisasi adalah situasi yang meminggirkan peran perampuan dalam wilayah publik sehingga berakibat pada perspektif pembangunan yang

tidak ramah. Stereotipe atau pelabelan negative bagi perempuan, narasi bahwa perempuan identik dengan kelemahan dilekatkan hanya karena berjenis kelamin perempuan. Kekerasan, bias gender serta manisfestasinya berakibat pada pemahaman laki-laki kuat dan perempuan lemah, cara pandang ini secara umum melekat pada masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan itu sendiri sehingga kita hari ini banyak menyaksikan bagaiaman angka kekerasan terhadap perempuan terus naik, jumlah kasus kekerasan terhadap perempun sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus.[8] Dan terakhir adalan beban ganda dalam kehidupan.

Aswaja sebagai *manhaj al fikr wal harokah* tentu senada dengan metode berpikir dan bergerak Kopri yang terus memperjuangkan kehidupan yang adil dan setara bagi setiap manusia. Selain itu seperti halnya aswaja Kopri harus menjadi penengah atau dinamisator dalam gerakan perempuan yang menampilkan corak gerakan yang moderat. Kopri bergerak tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, menegaskan karakteristik gerakan yang mengecam penindasan dengan upaya-upaya ramah yang menunjukan citra diri Kopri sebagai muslimah progresif.

B. Landasan Filosofis Kopri

1. Sejarah Gerakan Kopri

a. Cikal Bakal Kopri

Dalam sejarah panjang perjalanan kemerdekaan Indonesia, perempuan ditempatkan dalam peran sebagai tokoh yang ikut andil untuk memperjuangkan melawan Belanda sebagai musuh yang kejam kala itu, perempuan mempunyai peran sebagai panglima militer. Kedudukan perempuan sebagai mitra yang sejarah seperti yang ada dalam Al-Quran dimana Masing-masing mempunyai hak dan kewjiban yang sama atau seimbang. (Q.S. 2 : 228) sejajar dalam arti Mempunyai kesempatan beraktivitas dan berjuang serta akan diperhitungkan prestasi kerjanya. (Q.S. 4 : 32) dan Antara laki-laki dan perempuan saling melindungi. (Q.S. 9 : 71).

Nilai kesetaraan dan keadilan di dalam Islam dianggap sebagai ide yang normative bagi perempuan dan laki-laki pada kehidupannya menunjukkan realita yang berbeda. Perempuan masih dianggap sebagai objek. Pemaksaan syari'at Islam terhadap perempuan sering ditemukan pada masyarakat Islam yang 'militan'. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan hak-haknya, bahkan yang menyangkut persoalan mereka sendiri.

8 Komnas Perempuan.

Cengkraman budaya patriarki abad 20 turut mewarnai pergolakan dan relasi kader perempuan dan laki-laki, maka dapat dimaklumi produk gerakan yang dihasilkan tidak jauh dari urusan domestik belaka. Meski kecil, perempuan sudah memiliki peluang untuk menempati posisi strategis dalam struktur PMII. Situasi sosial, budaya dan politik saat itu turut menjadi penyebab minimnya kesiapan SDM perempuan secara kuantitas dan kualitas. Hanya sedikit dari perempuan yang mendapat akses pendidikan tinggi.

Enam puluh dua tahun yang lalu, saat PMII didirikan pada 17 April 1960 Korp PMII Putri (KOPRI) belum ada. Embrio KOPRI dimulai dengan nama divisi keputrian. Sejalan dengan situasi bangsa Indonesia saat itu yang berada dalam Era Orde, eksistensi perempuan diidentifikasikan dengan kecakapan menjahit, memasak dan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan urusan domestik.[9]

Gerakan PMII dan KOPRI sebagai organisasi mahasiswa yang menjalankan fungsi sebagai agen perubahan yang mempunyai paradigma Ahlu Sunnah wa al-Jamaah sebagai pondasi awal dalam membangun kekuatan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Maka KOPRI sangat potensial untuk melakukan trasfomasi menjadi gerakan yang mendukung perjuangan menuju masyarakat yang berkesetaraan.

Sehingga hadirnya divisi keputrian saat itu bisa menjadi bukti sejarah, kesadaran kritis kader KOPRI sudah mulai terbentuk sejak lama. Kondisi yang terjadi saat itu antara laki-laki dan perempuan saling bahu-membahu (guyub) dalam menutupi kekurangan di organisasi. Termasuk pula guyub dalam pengambilan keputusan serta beberapa hal yang mengharuskan mereka bekerja sama mempertaruhkan nama organisasi.[10]

Pada tahun 1966, Departemen Keputrian di bawah pimpinan Enny Suhaeni merumuskan Panca Norma KOPRI dan menelurkan gagasan pembentukan badan Semi Otonom PMII (KOPRI). Upaya terus dilakukan demi aksesibilitas perempuan dalam ruang publik. Tentu tidak mudah mengingat sistem pemerintahan orde baru saat itu sangat kuat memantau pergerakan aktivis mahasiswa.

b. Munculnya Nomenklatur Kopri

25 November 1967 di Semarang, Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Poetri (KOPRI) lahir dengan status semi otonom. KOPRI merupakan follow up atas dilaksanakannya Training Kursus keputrian di

9 PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 3.

10 Ibid hal 4

Jakarta pada tanggal 16 Februari 1966 yang melahirkan Panca Norma KOPRI.

Gerakan perempuan pada saat berdirinya KOPRI baru sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. NU contohnya, kita mengenal Muslimat yang hanya mengadakan kegiatan pengabdian sosial kemasyarakatan. Dalam tahap awal berdirinya, KOPRI banyak mengadopsi dan melakukan kerjasama dengan Muslimat, serta beberapa organisasi perempuan lain yang sudah lebih dahulu ada saat itu, seperti Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan Korp HMI-Wati (KOHATI).[11]

c. Babak Awal Gerakan Kopri

Wadah mobilisasi perempuan PMII adalah babak awal Gerakan KOPRI. Ini karena fungsi KOPRI tak lain karena untuk mengorganisir kekuatan perempuan PMII yang menopang organisasi yang menaunginya (PMII). Hal ini seperti juga terjadi di organisasi-organisasi lain baik organisasi mahasiswa, ormas keagamaan, dan organisasi politik pada zaman itu. Seiring perkembangannya, hubungan KOPRI dan PMII dianggap problematis karena gagasan otonomisasi di tingkat pusat (Pengurus Besar).

Dualisme organisasi adalah manuver politik yang tergambarkan. KOPRI memiliki program terpisah dan kebijakan yang berbeda dari PMII. Beberapa kalangan menganggap perkembangan ini sebagai suatu untuk diingat bersama, bahwa historis struktural pendorong lahirnya KOPRI sebagai organisasi ekstra kampus yang notabene merupakan kumpulan intelektual muda, di mana pada perkembangan awalnya perempuan di PMII masih termasuk dalam bidang keputrian. Tapi dengan kebutuhan serta didukung adanya kualitas dan kuantitas yang ada, menimbulkan keinginan yang tidak terbendung untuk mendirikan KOPRI sebagai otonom di PMII. Alasannya adalah sebagai upaya guna peningkatan partisipasi perempuan serta pengembangan wawasan wilayah-wilayah kerja sosial kemasyarakatan. Bentuk dan perkembangan struktur itulah yang kemudian kita mengenal adanya Pengurus Besar (PB), di provinsi ada Pengurus Koordinator Cabang (PKC), kabupaten atau kota ada Pengurus Cabang (PC), terus hingga ke Komisariat atau rayon yang dulunya bernama anak cabang, ranting dan sebagainya.[12]

Orientasi pemikiran sahabat-sahabat pendiri waktu itu dengan dibentuknya KOPRI sebagai organ otonom PMII adalah merupakan keinginan sahabat-sahabat dan kebulatan tekad yang teguh bahwa kaum

11 Ibid hlm. 18.

12 PB KOPRI editor: Asep Sabar, *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat, 2000, hlm. 1

perempuan cukup mampu dalam kebijakan tanpa harus lagi mengekor kepada laki-laki. Hal ini bukan berarti KOPRI terpicu oleh keinginan pragmatis dengan berkaca dari organisasi lainnya. Walaupun KOPRI merupakan bagian dari komunitas NU dan saat itu masih menjadi partai, tetapi tidak ada kaitannya sama sekali. Dengan terbentuknya KOPRI, baik itu alasan politis, kepentingan sesaat, maupun tunggangan ideologi, sekalipun NU merupakan parpol. Pada saat orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto, trend issu serta suara perempuan pada saat itu turun tensinya dan menuju pada titik kulminasi terendah, sangat melemah.

Kondisi saat itu dihisap oleh keberadaan penguasa yang dikenal otoriter serta menghegemoni seluruh kekuatan yang ada di masyarakat. Namun walaupun demikian itu bukanlah masalah yang berarti bagi KOPRI, karena PMII memiliki pola dan karakter gerakan yang massif-agressif, keterpurukan KOPRI itu bisa tertutupi dengan baik.

Harapan dan motivasi Gerakan KOPRI kembali mencuat dibawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawangsa, setelah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1991 mengenai Nilai Kader KOPRI dan pada saat itu pula kaderisasi KOPRI telah dibentuk pola pengkaderan yang sistematis yaitu dibentuk sistem kaderisasi yang terdiri dari Kurikulum dan Pedoman Pelaksanaan LKK (Latihan Kader KOPRI) serta petunjuk pelaksana Latihan Pengkaderan KOPRI, dalam hal jenjang pengkaderan KOPRI dibagi menjadi 2 tahap yaitu LKK (Latihan Kader KOPRI) dan LPKK (Latihan Pelatih Kader KOPRI), ini adalah satu bentuk kemajuan kepengurusan KOPRI dari waktu ke waktu.

PMII secara institusi selalu selangkah lebih maju dengan rekapitalisasi gerakan. Tidak demikian dengan KOPRI yang dirasakan justru kehilangan orientasi, dan mengalami distorsi paradigma gerakan yang dibangun pada saat itu. Tapi karena hubungan antara KOPRI-PMII baik-baik saja, maka secara personal sahabat-sahabat perempuan KOPRI masih sering diajak berurun dan berembug, berdiskusi, atau dilibatkan dalam beberapa kegiatan.

Secara struktural KOPRI di dalam institusinya berstatus semi otonom atau bagian integral dan tidak terpisahkan dari wadah utamanya yaitu PMII. Lewat semua itu, KOPRI banyak belajar dan menyadari betul tentang perlu adanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan. Dan performance pemimpin sangat mempengaruhi gerak dan aktifitas organisasi.

Klaim tentang kesadaran gender pada PMII membangun argumentasi bahwa pembubaran KOPRI merupakan keharusan. Karena KOPRI hanya mengakibatkan eksklusifitas perempuan di PMII. Organisasi perempuan

sebagai subordinat dari organisasi lain dianggap memberi legitimasi terhadap streotype perempuan sebagai makhluk subordinat dan kontra produktif terhadap gerakan perempuan untuk penyadaran, kesetaraan, pemberdayaan akses dan advokasi perempuan.

Cabang-cabang KOPRI yang membuat keputusan untuk meleburkan diri dengan PMII bereksperimen untuk berkompetisi dengan warga PMII lainnya dengan mengandalkan seleksi alam. Kader KOPRI dilanda syndrome inferior untuk menamakan diri sebagai bagian dari KOPRI. Mereka lebih nyaman menjadi PMII atau menjadi bagian dari wadah lain (asal bukan KOPRI). Disisi lain adalah fenomena kemandegan KOPRI, dimana eksis secara struktur tapi tidak melakukan apa-apa dan beberapa cabang KOPRI yang merasa tidak terganggu dan enjoy menjadi bagian dari PMII dengan alasan adanya sinergitas antara PMII dan KOPRI

d. Impres Tahun 2000 Pengaruhu Pembubaran Kopri

Tidak dipungkiri bahwa pembubaran KOPRI pada Kongres XIII di Medan tahun 2000 merupakan salah satu pengaruh dari euforia gerakan kesadaran gender, sebagai dampak dari Impres tahun 2000. Selama ini kita merasakan tampak kesenjangan-kesenjangan, tidak hanya antara kader lakilaki dan perempuan, tetapi juga antar daerah. Memang terdapat beberapa eksperimentasi yang dilakukan oleh sebagian kecil daerah (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dengan menafsirkannya dalam bentuk jaringan gender sementara daerah lain menjadi tampak kesulitan.

Hal ini karena pembubaran KOPRI tidak dibarengi dengan usaha institusionalisasi yang serius ke arah penataan kelembagaan. Sehingga secara institusional yang terjadi bukan memperteguh pemberdayaan kader putri, tetapi meluluh lantakannya kembali ke titik nol. Maka bukan hal yang mustahil manakala ditengah lemahnya mobilitas sosial dan aktualisasi diri kader putri yang secara sosiologis berlatar rural (pedesaan) ada kecurigaan bahwa pembubaran KOPRI adalah “Patriakhal Conspiration”.

Ibarat perang, kader putri yang memang “dilemahkan berangkat ke medan kontestasi”. Mengambil pilihan liberal atau kontestasi bebas di tengah kader yang tidak seimbang oleh kondisi sosial yang timpang/serba laki-laki memang terlihat naif karena dengan begitu akan menimpakan masalah ketimpangan pada perempuan yang sesungguhnya juga adalah korban (*Blamming the Victim*).

Untuk menunjukkan bahwa PMII adalah organisasi pro-demokrasi dan HAM sehingga tidak memandang laki-laki dan perempuan secara dikotomis.

Akan tetapi argumentasi kesadaran gender di PMII terjadi bersamaan dengan fenomena-fenomena sebagai berikut: pertama, marginalisasi perempuan di kepengurusan PMII di setiap level kepengurusan. Kedua, munculnya krisis kader perempuan dalam PMII yaitu terjadinya gap antara jumlah anggota perempuan yang aktif dengan jumlah anggota yang pasif. Pada saat dilakukan MAPABA di PMII biasanya separuh atau lebih merupakan kader perempuan.

Mayoritas dari mereka hanya sempat mengikuti MAPABA, dan setelah itu seleksi alam akan menentukan apakah seorang kader perempuan akan bertahan atau tidak. Ketiga adalah kader putri yang melakukan pembaharuan melalui KOPRI terutama di PB KOPRI dan cabang-cabang PMII yang masih mempertahankan KOPRI.

Aktivitas KOPRI melihat bahwa di tubuh PMII kesadaran gender terjadi bersamaan dengan ketimpangan gender yang tercermin dari ketidakjelasan kebijakan PMII terhadap kader perempuan yang jumlahnya melebihi 50% dari kader PMII seluruhnya. Hal ini disebabkan karena PMII merupakan organisasi secara idealitas tidak membedakan kader laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ditingkat realitas menunjukkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kader perempuan PMII tidak memiliki landasan konstitusional yang jelas dalam memperjuangkan aspirasi perempuan

e. Eksistensi dan Konsistensi Gerakan Kopri

Berdasarkan forum musyawarah yang diamanatkan oleh Kongres XIV di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur untuk membuat pertemuan POKJA Perempuan PMII pada tanggal 26-29 September 2003 yang menghasilkan ketetapan bahwa dibentuk kembali keorganisasian wadah perempuan yang bernama KOPRI (Korps PMII Putri) yang merupakan bagian integral dengan PMII di Jakarta pada tanggal 29 September 2003 di mana PB KOPRI berpusat di Jakarta. Dengan visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan misinya adalah mengideologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender.

Ketika PMII berusaha untuk memaksimalkan kader-kader perempuan PMII untuk mampu bersaing dan mandiri dengan membentuk badan semi otonom yaitu KOPRI, tetapi keberadaannya tidak dapat dirasakan oleh kaderkader PMII secara keseluruhan baik itu laki-laki maupun perempuan apalagi masyarakat yang lebih luas, keberadaan KOPRI seperti "Hidup segan mati tak mau". Masing-masing daerah belum terkonsentrat dalam hal sistem

kaderisasi KOPRI karena minimnya pemahaman mengenai KOPRI itu sendiri, padahal pada masa kepemimpinan Sahabati Khofifah sudah dibentuk Latihan Kader KOPRI (LKK) dan Latihan Pelatih Kader KOPRI (LPKK).

Seiring berjalannya waktu, masing-masing daerah membentuk sistem kaderisasi KOPRI sendiri dengan mengikuti perkembangan waktu dan pemahaman dari setiap kader di daerah, seperti di KOPRI PKC Jawa Barat membentuk sistem kaderisasi KOPRI yang dikenal dengan SKK (Sekolah Kader KOPRI) I, SKK II, dan SKK III mengikuti jenjang pendidikan formal di PMII. Kemudian KOPRI PC Kota Malang membentuk sistem kaderisasi KOPRI yang dikenal dengan SKP (Sekolah Kader Putri) I, SKP II dan SKK begitupun KOPRI PC. Kota Malang mengikuti jenjang pendidikan formal di PMII.

f. Benang Merah Kopri

54 tahun, KOPRI telah melalui dinamika organisasi yang sangat panjang. Ketahanan KOPRI dalam menghadapi budaya patriarki dan tekanan politik menunjukkan kematangan KOPRI sebagai Gerakan perempuan yang konsisten mengawal dan memastikan setiap perempuan punya kesempatan yang sama untuk tampil dan mewarnai ruang publik dengan ide, kreativitas dan kecapakan keilmuwannya. Eksistensi dan konsistensi KOPRI dalam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai role model Gerakan perempuan Muslimah yang cinta NKRI sebagaimana tergambar dalam citra diri KOPRI.

Untuk mempermudah mempelajari sejarah gerakan KOPRI, dapat dilihat pada kolom dibawah ini:

No	Periodesasi	Bentuk Gerakan	Gagasan	Penggerak
1	1960-1966	Departemen Keputrian	Gerakan perempuan PMII lebih fokus memusatkan perhatian menangani masalahmasalah perempuan dan sebatas menjahit, memasak dan mengenai masalah dapur	1960-1961 : Mahmudah Nahrowi 1961-1967: Enny Suhaeni

2	16 Februari 1966	Training Kursus Keputrian	Panca Norma KOPRI dan menelurkan gagasan pembentukan badan Semi Otonom PMII (KOPRI)	Departemen Keputrian dipimpin oleh Enny Suhaeni
3	25 November 1967	Dibentuk KOPRI	Mengorganisir kekuatan kader perempuan PMII serta menjadi ruang gerak dalam mengeluarkan pendapat dan beraktifitas sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan masyarakat	Departemen Keputrian dipimpin oleh Tien Hartini PP Badan KOPRI Ketua umum : Ismi Maryam BA Sekretaris umum : Maryamah BA
4	1988		Dibentuk system kaderisasi yang sistematis terdiri dari Kurikulum dan Pelaksanaan LKK (Latihan Kader KOPRI) dan LPKK (Latihan Pelatih Kader KOPRI)	Ketua KOPRI: Khofifah Indarparawansa Sekretaris : Ulha Soraya
5	28 Oktober 1991		Lahir NKK (Nilai Kader KOPRI)	Ketua KOPRI: Khofifah Indarparawansa Sekretaris : Ulha Soraya
6	2000	KOPRI dibubarkan	Pembubaran KOPRI pada Kongres XIII tahun 2000 di Medan adalah dampak dari Inpres tahun 2000	-

7	2003	Amanat Pertemuan POKJA Perempuan	Kongres XIV di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur mengamanatkan membuat pertemuan POKJA Perempuan PMII	Ketua: Wiwin Winarti Sekretaris: Nina Hunainah
8	26-29 September 2003	Pertemuan POKJA Perempuan	Gagasan dilahirkan keorganisasian wadah perempuan	Ketua: Wiwin Winarti Sekretaris: Nina Hunainah
9	29 Septem-ber 2003	KOPRI	Dibentuk kembali keorganisasian wa-dah perempuan yang bernama KOPRI (Korps PMII Putri) dengan Visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlan-daskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Misinya adalah mengide-ologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk memba-ngun masyarakat yang berkeadilan gender	Ketua: Wiwin Winarti Sekretaris: Nina Hunainah
10	2003-2014	KOPRI	KOPRI daerah masing-masing membuat sistem kaderisasi KOPRI (Tidak terkonsentrasi pada modul tunggal kaderisasi KOPRI)	

11	2014	Kongres XVII di Jambi	Lahirnya IPO (Ideologi Politik Organisasi) KOPRI	Ketua: Irma Muthoharoh Sekretaris: Herwanita
12	2014	KOPRI	KOPRI PB PMII menyusun panduan PPK (Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI)	Ketua: Ai Rahmawati Sekretaris: Desmiati Ishak
13	2015	KOPRI	KOPRI PB PMII mensistematiskan buku tunggal kaderisasi nasional KOPRI	Ketua: Ai Rahmawati Sekretaris: Desmiati Ishak
14	2015	KOPRI	KOPRI PB PMII membuat buku dakwah KOPRI sebagai panduan dalam melakukan gerakan kultural KOPRI dalam mengahadapi kencangnya islam transnasional dan arus globalisasi	Ketua: Ai Rahmawati Sekretaris: Desmiati Ishak
15	2015	KOPRI	KOPRI PB PMII membuat buku panduan advokasi sekaligus lembaga LP3A (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan & Anak)	Ketua: Ai Rahmawati Sekretaris: Desmiati Ishak
16	2017-2021	KOPRI	Desentralisasi SKKN ke berbagai zona di Indonesia	Ketua: Septi Rahmwati Sekretaris: Nurma Ningsih

17	2017-2021	KOPRI	Merumuskan buku Pedoman Kaderisasi	Ketua: Septi Rahmwati Sekretaris: Nurma Ningsih
18	2021-2024	KOPRI	KOPRI PB PMII me-launchingkan modul dan buku pedoman kaderisasi multidimensi berbasis digitalisasi	Ketua: Maya Muizatil L Sekretaris: Nopa Supensi
19	2021-2024	KOPRI	KOPRI PB PMII me-nerbitkan modul dan buku pedoman kaderisasi multidimensi berbasis digitalisasi	Ketua: Maya Muizatil L Sekretaris: Nopa Supensi
20	2021-2024	KOPRI	Desentralisasi SKKN ke berbagai zona di Indonesia	Ketua: Maya Muizatil L Sekretaris: Nopa Supensi
21	2021-2024	KOPRI	Membuat Modul Fasilitator dan Mencetak Fasilitator KOPRI di seti-ap tingkatan (SIG, SKK, SKKN) berupa mengada-kan Pelatihan Fasilitator Nasional, Wilayah, dan Daerah	Ketua: Maya Muizatil L Sekretaris: Nopa Supensi

2. Panca Norma Kopri

Panca Norma KOPRI dicetuskan pada tanggal 16 Februari 1966 pada saat pelaksanaan Training Course Keputrian I PMII di Jakarta bersamaan dengan pelaksanaan Mukernas I, yang berisi sebagai berikut[13]:

a. Tentang Emansipasi

1) Tentang Emansipasi, berarti memberikan hak-hak dan kesempatan kepada wanita sederajat, setingkat dan seirama dengan kaum pria.

13 PB PMII, Dokumen Historis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Jakarta:1985. (Dicetuskan pada Training Course Keputrian PMII tanggal 16 Februari 1966 di Jakarta)

Bukan merupakan pemberian hak-hak istimewa karena penghargaan atau perbedaan naluri fitriahnya justru karena dia wanita

2) Tuntutan akan hak-hak wanita, meliputi segala segi kehidupan baik politik sosial ekonomi, maupun kebudayaan. Hak-hak ini diberikan adalah merupakan tuntutan nurani yang mendorong manusia berkeinginan, berkehendak dan berbuat sebagai realisasi dan manifestasi dari pada ajaran Islam
3) Perjuangan hidup baik di dalam bidang politik, sosial ekonomi maupun kebudayaan adalah suatu tuntutan yang bagi kita mempunyai ukuran-ukuran yaitu yang didasarkan atas perbedaan struktur rohaniah jasmaniah dan kondisi ruang dan waktu
4) Pembatasan atas hak adalah kewajiban yaitu suatu langkah dan tindakan yang harus ditempuh lebih dulu. Ini berarti bahwa kewajiban harus mendapat tempat yang lebih utama daripada tuntutan akan hak
5) Manifestasi daripada itu ialah pengorbanan kaum perempuan untuk berjuang menyelami dan terjun dalam langkah perjuangan politik, sosial ekonomi, kebudayaan, dalam mana kewajiban seorang putri telah terpenuhi dan akan berjalan seiring dengan hakhak yang dituntutnya

b. Tentang Etika wanita Islam

1) Ajaran tentang hak batal, benar salah, baik buruk, bermoral immoral adalah suatu persoalan etika. Etika yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an dan Assunnah, yaitu etika Islam. Etika yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan, baik dalam bentuk pengabdian kepada Tuhan maupun berhubungan antar manusia dengan manusia, dan perkembangan kebudayaannya
2) Pengabdian kepada Tuhan adalah suatu bentuk pengabdian yang tertinggi dan merupakan gerak hidup yang disandarkan atas taqwallah dengan beramar ma'ruf nahi munkar membabat jiwa keimanan, keikhlasan serta tawadlu' dan khusuk
3) Hubungan antar manusia diperlukan keharmonisan, keserasian dan penyesuaian akan arus perkembanagan dan perubahan zaman berpegang kepada ajaran agama dan etiket pergaulan adalah suatu kemutlakan, sehinggaprinsip perorangan yang tidak hanyut terseret oleh arus yang tanpa arah dapat terkendalikan secara positif

4) Etiket pergaulan yang diartikan dengan "Tata Cara Pergaulan" mempunyai arti relatif, anggapan sopan bagi suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lain, dan pandangan benar bagi suatu ajaran pun menempatkan hal yang sama. Garis penegas yang positif bagi realisasi bentuk-bentuk itu adalah pandangan agama, suatu ajaran yang mempunyai norma-norma hukum nasional maupun internasional
5) Arus budaya yang senantiasa berkembang akan senantiasa mendapatkan tempat dalam masyarakat. Posisi menarik bukan lebur tertarik adalah suatu norma bagi PMII, perkembanagn budaya sebagai hasil pikiran harus diarahkan, diisi dan dijiwai ajaran agama, moral nasional dan kepribadian bangsa

c. Tentang Watak PMII Putri dalam Kesatuan dan Totalitas Berorganisasi

1) PMII Putri adalah bagian dan organ organisasi yang tak terpisahkan dari PMII. Ia sebagai organ bukan merupakan kesatuan yang terpisahkan dan berdiri sendiri dalam kesatuan tubuh. Tetapi ia merupakan suatu paduan dan persenyawaan yang tanpa melarutkan sifat dan ciri-ciri kewanitaannya yang dibawanya sebagai fitrah dan kondisi potensial yang dimilikinya
2) Sebagai organ yang tak terpisahkan ia melakukan perjuangan yang senada dan seiring, selangkah dan seirama, maju dalam berbagai bidang tujuan organisasi, bidang kepemimpinan dan interdepartemental merupakan suatu bentuk-bentuk lapangan perjuangan yang mendapat sorotan dan hak memanfaatkan akan perjuangan yang mendapat akan tuntutan sosial wanita dimana tugas-tugas dan peranan organisasi tak dibedakan
3) Sebagai mahasiswa putri Islam, walaupun merupakan kesatuan organ yang tak terpisahkan, tetapi ia mempunyai sikap hidup dan pandangan dan langkah serta tindakan yang berbeda dengan mahasiswa-mahaiswa di luar Islam, bahkan berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa putri di luar Ahlussunnah Wal Jamaah
4) Suatu kesatuan dalam totalitas berorganisasi adalah suatu bentuk antara PMII putri dan PMII putra merupakan suatu paguyuban. Tetapi garis pemisah yang terbatas dengan norma dan kaedahkaedah agama suatu tuntutan mutlak yang memberikan tabir dan benteng ukuran moral dan watak positif sehingga moral

dan amalan syariat Islam terjamin karenanya

d. Tentang Partisipasi PMII Putri terhadap Neven-Neven Organisasi

1) Sebagai organ yang memihak pada ideologi partai maka neven organisasi yang berafiliasi terhadap partai adalah juga alat perjuangan yang senada dan seirama, seiring dan berdampingan dalam mencapai tujuan bersama dan tujuan yang sama
2) Sikap masa bodoh, sikap rendah diri, sikap penakut dan nrimo adalah suatu bentuk yang tidak seharusnya ada bagi PMII Putri, justru emansipasi wanita maka sifat-sifat kerendahan itu dapat dilenyapkan
3) Atas dasar tanggungjawab yang mendalam terhadap agama, bangsa dan revolusi, maka partisipasi terhadap neven-neven organisasi sebagai alat partai dan revolusi terutam organisasi wanita adalah kemutlakan yang tak dapat dielakan adanya
4) Usaha-usaha konkrit ke arah itu dapat dilakukan ialah turut meningkatkan kemampuan-kemampuan dan daya perjuangan dalam berorganisasi khususnya terhadap Muslimat, Fatayat, IPPNU baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, perkembanagan kebudayaan, maupun dalam bidang-bidang yang lebih luas dengan didasarkan atas kondisi, tempat dan waktu sekarang
5) Bidang-bidang praktis yang dapat dilakukan dalam usaha partisipasi ini meliputi bidang-bidang organisasi, administrasi, latihan-latihan kepemimpinan, pendidikan dan pengajaran, kebudayaan, dakwah Islam dalam perkembangan organisasi, maupun dalam berbagai bentuk sosial kemasyarakatan yang lain yang menyangkut peri hidup wanita dalam hubungannya dengan perjuangan agama dan revolusi

e. Tentang Partisipasi PMII Putri terhadap Kegiatan-Kegiatan Masyarakat

1) Pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan suatu amanat Tuhan. Ia merupakan amal ibadah kalau pengabdiaannya itu diiringi niat yang ikhlas dan pembaktian kepada Tuhan. Jurang pemisah anatara perkuliahan dan masyarakat mutlak ditolak dan organisasi berarti jembatan emas penghubung antara keduanya
2) PMII Putri sebagai mahasiswa dan anggota masyarakat, akan

menyatukan dwi tunggal antara ilmu dan amal, antara teori dan perbuatan, berusaha merelaisasikan satunya kata dan perbuatan serta ikut serta secara aktif dalam seluruh kegiatan dan aktifitas masyarakat selagi ia tidak bertentangan dengan norma-norma agama

3) PMII Putri sebagai wanita realistik, mampu menyelesaikan tugastugas kemasyarakatan, dan tugas-tugas ini akan diselesaikan kalau tugas-tugas dan bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan masyarakat itu semata-mata mengarah kepada kepentingan agama, nusa, bangsa dan revolusi
4) Secara konkrit ia akan mendharmabaktikan dalam seluruh bentuk kehidupan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan maupun dalam perkembangan kebudayaan
5) Suatu pembaktian yang mesti dituntut lebih dahulu agar tidak menyimpang dari norma-norma agama, revolusi dan kemasyarakatan, adalah usaha mutlak untuk mempelajari hukum dan ajaran agama. Doktrin revolusi dan pengetahuan masyarakat Indonesia

3. Citra Diri Kopri

Perkembangan ilmu dan teknologi sangat membantu kehidupan manusia dalam banyak aspek. Arus percepatan informasi menjadi sangat mudah diakses karena kecanggihan teknologi dan komunikasi. Namun, adanya percepatan teknologi tersebut menimbulkan kebermanfaatan dan kerugian tersendiri tergantung penggunaan masing-masing.

Menghadapi fenomena demikian, sudah seharusnya sikap KOPRI senantiasa cakap, cepat, tanggap dalam menerima modernisasi dalam rangka melakukan transformasi gerakan perubahan terhadap gerakan perempuan. Tanpa melupakan prinsip Aswaja dalam tubuh PMII dan KOPRI sebagai landasan dan corong berpikir kader untuk melakukan perubahan menuju kebaikan dalam tata masyarakat yang berkembang.

Kader-kader KOPRI harus menjadi corong perubahan untuk masa depan perempuan di negeri ini karena fenomena kedepan tantangan perempuan adalah persaingan kompetensi dan apa yang dapat ditawarkan oleh KOPRI sendiri dalam membangun peradaban yang sempurna di negeri ini.

KOPRI menjadi wadah perempuan PMII yang memiliki kesadaran kritis serta mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, dalam

proses itulah dibutuhkan pola kaderisasi yang menciptakan identitas dan citra diri kader yang cerdas, visioner dan berakhlakul karimah serta memiliki karakter yang kuat serta pijakan gerakan pada aswaja dan kearifan lokal.[14]

Komponen pola kader KOPRI tersebut diharapkan menjadi pola kaderisasi dalam mempersiapkan generasi perempuan yang mandiri dan maju sesuai dengan landasan dan produk hukum PMII lainnya. Sehingga kedepannya PMII dan KOPRI hadir di tengah problematika bangsa dan mampu menghadirkan solusi yang solutif dalam memecahkan problematika yang terjadi di tengah masyarakat.

Citra Diri seorang kader Kopri tidak pernah lepas dari penekanan Nilai Kader Kopri, atau yang biasa disingkat NKK. NKK merupakan sebuah sarana kader KOPRI untuk mengenal, melihat dirinya sendiri dan bahkan mengharapkan yang lain untuk melihat. NKK juga merupakan potret yang diharapkan.

Untuk menjawab pertanyaan "Siapa saya ini" maka NKK mengembangkan sebagai berikut:

a. Kader KOPRI sebagai insan individu harus dipenuhi dengan muatan religiusitas karena islamnya, harus dipenuhi dengan muatan intelektualitas karena mahasiswa, dan juga harus dipenuhi dengan muatan kemandirian karena kedewasaannya
b. Kader KOPRI sebagai makhluk sosial, tanpa membedakan unsur suku, agama, ras dan antar golongan serta melihat dimensi ruang dan waktu
c. Kader KOPRI sebagai insan organisasi, harus mengembangkan sikap profesionalitas dalam menjalankan aktifitas

Sedangkan fungsi dari Nilai Kader Kopri (NKK) dalam membentuk Citra Diri Kader Kopri yaitu:

a. Sebagai justifikasi terhadap tertib sosial dan tertib organisasi yang mensyaratkan pada anggota untuk menerima
b. Sebagai konstruk yang sah dan dianggap vital secara moral mengikat. Jadi setiap tindakan harus berada dibalik legitimasi NKK
c. Mampu menumbuhkan "sens of belonging" warga terhadap organisasi yang mempertautkan kolektifitas masa lampau sekaligus diarahkan pada masa depan sebagai pengidentifikasian diri terhadap lingkungan yang selalu berubah

14 Diambil dari Buku Kaderisasi KOPRI, peride Ai Rahmawati 2014-2017 hlm 78

d. Sebagai pedoman yang memberikan wawasan mengenal misi dan tujuan organisasi sekaligus merupakan komitmen untuk bertindak

Berangkat dari pemikiran di atas, maka Nilai Kader KOPRI dapat dirumuskan sebagai pondasi awal guna membentuk Citra Diri Kader Kopri dalam beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

a. Modernisasi

Modernisasi telah mampu mengembangkan suatu kultur dengan menempatkan bentuk rasionalitas tertentu sebagai nilai yang menonjol tapi dalam beberapa hal sering gagal, karena rasionalitas itu kurang bisa dipaksa sebagai panutan yang tepat. Meskipun begitu rasionalitas dalam beberapa segi telah mampu mengganti semangat keagamaan.

Modernisasi seringkali ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata mampu merubah beberapa pandangan manusia dalam beberapa masalah kehidupan mereka, akibatnya manusia seringkali mengidiologikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sembahan kehidupan. Menghadapi fenomena demikian, maka sikap KOPRI menerima modernisasi secara selektif mana yang harus diambil

b. Mitra Sejajar

1) Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kodrat yang berbeda, namun sama-sama mempunyai tanggungjawab kekholifahan. (Q.S 8: 165)
2) Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama seimbang. (Q.S 2: 228)
3) Mempunyai kesempatan beraktifitas dan berjuang serta akan diperhitungkan prestasi kerjanya. (Q.S 4: 32)
4) Antara laki-laki dan perempuan saling melindungi. (Q.S 9: 71)
5) Antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. (Q.S 2: 167)

c. Wanita Ideal

1) Sholihah, taat, dan menjaga diri dengan baik. (Q.S 2: 34)
2) Beriman, tunduk, jujur, khusuk dan dermawan, menjaga kehormatan dan banyak berdzikir kepada Allah. (Q.S 33: 35)
3) Memiliki pribadi yang dinamis dan kreatif ditunjang dengan

tindakan, intelegensi dan kasih sayang

4) Memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari keterbatasannya, menembus ruang dan waktu untuk meningkatkan kehidupan sosial

d. Watak Kopri

1) KOPRI dalam melakukan kegiatan tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaannya

2) KOPRI mempunyai tindakan, pandangan dan langkah yang berbeda dengan mahasiswi non Islam, bahkan di luar Ahlussunnah Wal Jamaah pun harus beda

4. Ideologi Politik Organisasi (IPO) Kopri

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri merupakan organisasi mahasiswa yang memliki latar belakang dengan kultur keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). PMII dalam narasi gerakan mengusung isu-isu kontemporer sekaligus menggugat kemapanan-kemapanan intelektual dan kekakuan-kekakuan konservatisme. PMII memposisikan dirinya sebagai kelompok muda NU progresif yang berada pada dinamika pergulatan negara dan masyarakat. PMII hadir sebagai alat pengontrol sekaligus penekan basis atas untuk kepentingan masyarakat atau kelas bawah.

Indonesia berada pada situasi yang akut, di mana sistem kapitalis neoliberal yang masuk ke sendi-sendi negara semakin merajalela. Imbas dari konspirasi tersebut maka posisi yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat bawah tidak terkecuali perempuan di dalamnya. Kemiskinan, kebodohan, terusir, biaya yang mahal, penindasan dan lain sebagainya seakan menjadi tontonan sehari-sehari di republik ini. Ini adalah tantangan serius yang dihadapi bangsa ini. Sehingga untuk melawan dan mengikis sistem yang akut tersebut dapat dilakukan melalui kehendak masyarakat, individu dan alat perjuangan yang mempunyai kesadaran untuk melawan penjajahan gaya baru yakni kapitalis neoliberal.

Dalam sejarah gerakan kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajahan Negara-negara maju, dibutuhkan kecermatan analisa, taktik strategi dan landasan ideologis yang jelas untuk mengintervensi kesadaran massa akan pentingnya arah dan tujuan gerakan, misalkan gerakan mengusir penjajah belanda dari Indonesia yang dikawal oleh Soekarno, termasuk juga pendiri NU yakni KH. Hasyim Asy'ari.

Mereka sangat gigih dan lantang dengan konsepsi Nasionalis-Marhaen

dan ReligiousMustadl'afin sebagai manifestasi yang harus tercipta dalam tatanan bangsa kedepan. Begitupun juga dibelahan negara lain, Lenin dengan konsep marxissosialisnya berhasil meruntuhkan rezim diktator Tzar, Iran dengan revolusi islamnya, Venezuela dengan revolusi sosialisnya dan lain sebagainya. Ini menandakan betapa sangat urgen sebuah landasan dan taktik strategi yang sistematis dalam organisasi atau gerakan perlawanan untuk mengusir penjajah atau musuh yang menyengsarakan rakyat.

Sebagaimana ajaran Islam tradisional lain, NU mengambil gagasangagasan politik Sunni klasik sebagai rujukan teoritis utama. Kutipan dari karya-karya al-Mawardi, al-Ghazali, al-Baqillani, dan yang lainnya banyak ditemukan dalam teks-teks NU. Itulah dasar formal pendekatan politik NU yang mirip seperti di dalam yurisprudensi Abad Pertengahan. Kebanyakan tokoh NU pada 1950-an dan 1960-an adalah produk pendidikan pesantren, yang mata ajarannya adalah ilmu fikih. Dan bagi kaum tradisionalis, fikih merupakan ratu ilmu pengetahuan.[15]

Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Ketiga kategori ini saling berkaitan dan dalam tingkatan yang berbeda berdasarkan pada prinsip-prinsip fikih. Istilah kebijakan dalam hal ini digunakan untuk pengertian yang netral, yaitu pengambilan tindakan yang kondusif bagi upaya manfaat atau menghindari kerugian. Keluwesan dalam pengembalian keputusan itu sebagian merupakan wujud penerapan kaidah fikih. Suatu krisis memerlukan perhitungan-perhitungan baru tentang keuntungan dan kerugian sehingga sikap atau posisi sebelumnya dapat dipertimbangkan kembali. Sedangkan moderatisme dapat diartikan sebagai suatu keinginan menghindari tindakan yang ekstrim dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat. Dan dalam wacana NU secara makro, gagasan tersebut digambarkan secara jelas.[16]

PMII sebagai organisasi kader yang menganut ideologi Ahlusunnah wal jama'ah, seharusnya mampu menjadi dinamisator gerakan perubahan untuk masyarakat Indonesia. Seperti yang ditekankan oleh aswaja itu sendiri. Aswaja hadir dalam tubuh PMII sebagai landasan dan landasan berfikir kader untuk melakukan perubahan kebaikan dalam tata masyarakat yang berkembang. Dalam prinsipnya, al-khuriyah, al-'adalah dan al-musawwamah (Pembebasan/kemerdekaan, keadilan dan kesetaraan) aswaja hadir bukannya berdimensi dengan nuansa spiritual, akan tetapi harus mampu tampil sebagai

15 Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKIS, 2011, p. 165.
16 Greg Fealy, Ijtihad *Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), p. 165.

narasi yang bisa memberikan solusi untuk bangsa terkait mengenai masalah muamalah, dan ini lebih dominan.

KOPRI yang juga bagian dari instrument ideologi aswaja hendaknya bisa mengurai secara sistematis tentang aswaja dan melakukan pembacaan ulang konteks kekinian terkait kebutuhan mendasar bagi pembebasan kaum perempuan. Di mana ketidak-adilan terhadap perempuan semakin merajalela di bumi ini, marginalisasi, stereotype, subordinasi/ penaklukan/ penomorduaan, kekerasan dan beban ganda sangat erat dengan perempuan. Perempuan harus kuat dan progresif serta menolak ketertundukan yang menyebabkan keterpurukan bagi kaumnya. Dengan hal tersebut, maka perempuan harus bisa mandiri dengan dinamikanya untuk mendorong tatanan nilai yang ekologis bagi semua makhluk bumi ini. Dan tidak mungkin sebuah perjuangan tanpa ideologi yang jelas, garis perjuangan politik yang sistematis dan organisasi/alat perjuangan yang kuat untuk merealisasikan cita-cita tersebut

Setiap organisasi harus mempunyai pandangan dan garis perjuangan yang jelas, dalam arti sederhana; cita-cita untuk kebaikan bersama umat manusia. setelah selesai secara ideologi maka, sebuah ketegasan dari cita-cita perjuangan politik mutlak harus terlaksana. Dalam prinsip aswaja dan pilarnya; pembebasan, keadilan dan kesetaraan mutlak menghadirkan musuh yang harus kita kikis habis keberadaan dan ruang geraknya. Karena akar masalah yang menyebabkan terjadinya degradasi kemanusiaan yang terjadi (baik terhadap laki-laki maupun perempuan) adalah bergerak bebasnya musuh rakyat yang menguasai seluruh sendi sendi bangsa dan Negara, ini juga tidak terkecuali perempuan.

Berikut beberapa kondisi yang menjadi tantangan KOPRI yang harus di hadapi dan dihapuskan sebagai garis perjuangan politik Kopri:

a. Budaya Patriarki

Budaya yang menomorduakan posisi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai entitas masyarakat yang inferior. Inilah yang kemudian menghambat perempuan untuk maju

b. Kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalis (yang menghendaki nilai lebih), dalam islam disebut juga riba, mendapatkan hidup dari hasil ekploitasi sumberdaya yang terus-menerus demi kepentingan akumulasi dan juga penghisapan manusia antar manusia. Dengan penguasaan dan kepemilikan individu yang lebih, Kekayaan yang dikumpulkan hanya dinikmati oleh beberapa gelintir

orang saja. Akhirnya perempuanlah yang menjadi korban paling utama dengan sistem tersebut. Perempuan hanya menjadi objek dan komoditi dari kepentingan modal mereka, perempuan dijadikan pekerja penurut dengan upah yang murah.

1) Fasisme religius

Fasisme sendiri adalah sebuah system yang dibangun oleh kelompok borjuis kecil dan tengah Eropa untuk menguasai negara. Fasisme juga bisa dikatakan sebagai penguasaan atau kediktatoran penuh yang reaksioner. Ciriciri dari fasisme religious adalah a) *Gerakannya mengambil bentuk mobilisasi massa di jalanan* (Contoh; militer, FPI, HTI, dll. Isu-isu yang diusung : anti pluralisme, anti demokrasi, anti liberalisme,dll), b) *Percaya pada keagungan sistem dan nilai-nilai sosial masa lalu;* (seperti konsep khilafah, kehebatan kepemimpin masa lalu dll). Tindakan fasisme religious sangat merugikan perempuan, dengan klaim kebenaran tafsir yang mereka suguhkan, apa yang kemudian dilakukan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Contohnya adalah serangan brutal yang dilakukan oleh FPI dan kelompok kanan lainnya terhadap ideologi atau faham yang dianggap sesat (ILGA, Ahmadiyah, Komunisme dll), penerapan perda di beberapa wilayah di Indonesia, dengan dalih kemuliaan untuk perempuan, perempuan terbelenggu dalam ruang public dan mengembalikannya ke ranah domestik. Bukan hanya itu, penafsiran mereka yang dianggap sebuah kebenaran tunggal dalam membolehkan poligami dan etika perempuan menjadikan perempuan terkurung dalam ruang yang sama sekali jauh dari esensi kehidupannya.

2) Imperialisme

Imperialisme atau disebut juga penjajahan gaya baru atau penjajahan non fisik, imperialisme adalah bergeraknya modal asing yang sangat bebas untuk menguasai sumber daya alam dan asset-aset masyarakat. Metode yang dilakukannya adalah melalui kerjasama investasi atau pembelian aset-aset kepemilikan Negara/masyarakat (kepemilikan produksi emas, baja, minyak, telekomunikasi dan lainnya oleh pemodal besar dan Negara maju) dan pemberian utang yang menjerat Negara dan rakyatnya. Sehingga kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kriminalitas semakin merajalela di Negeri ini. Disinilah perempuan juga terkena dampak yang sangat serius, khususnya ibu rumah tangga yang kesehariannya berjibaku dengan kebutuhan pokok keluarga. Ketika keempat musuh tersebut masih bertahan dan merajalela, maka sebuah keniscayaan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan tercipta di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai ini.

Kunci memenangkan pertarungan dengan kelompok kanan radikal/ fasisme religius ini tergantung pada seberapa mampu Gerakan progresif Kopri membangun basis massa yang terorganisir dan berksadaran kritis, serta seberapa mampu Kopri memenangkan pertarungan di jalan-jalan.

Lalu dari keempat tantangan yang diuraikan diatas, salah satu jalan untuk melawannya adalah keseriusan dari individu dan organisasi kita yang tertuang dalam landasan ideologi yang jelas kemudian diteruskan dengan taktik strategi organisasi yang sistematis.

Disamping tantangan-tangan yang dijelaskan diatas, Indonesia telah memberikan berbagai jalan untuk menghormati dan memberikan *affirmative action* kepada kaum perempuan, baik berupa Peraturan Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) hingga Undang-Undang. Hal ini seharusnya menjadi batu lompatan kaum perempuan, organisasi perempuan khususnya KOPRI untuk bangkit dan memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan peran perempuan di Negara ini.

Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengamanatkan perlunya melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG), PUG yang dimaksud merupakan penguatan atas sepuluh komitmen politik, yaitu: 1) Pengakhiran kemiskinan Perempuan, 2) Kesehatan Reproduksi, 3) Pekerjaan yang layak, 4) keterwakilan perempuan dalam politik, 5) kekerasan terhadap perempuan, 6) pendidikan, 7) perempuan di wilayah konflik dan bencana, 8) kebebasan beragama, 9) hukum yang tidak diskriminatif pada perempuan, 10) anti korupsi. Mandat tersebut bukanlah hal baru karena sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan pada pemerintaha Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui UndangUndang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014.[17]

Selain itu, Indonesia telah memberikan *affirmative action* untuk perempuan-perempuan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif (*affirmative action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia, mengatakan bahwa affirmative action merupakan

17 Ujang Komarudin (2002) Sistem Sosial dan Politik Indonesia: Jakarta

kebijakan, peraturan atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarjinalisasi dan lemah secara sosial dan politik, seperti kelompok miskin, penyandang cacat, buruh, petani, nelayan dan lain-lain, termasuk di dalamnya kelompok perempuan.[18]

Tujuan dari kebijakan afirmasi, pertama, menghilangkan diskriminasi yang bersifat sistemis atau mengakar pada sejarah dan sosialbudaya. Kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara, baik berdasarkan gender maupun kelompok sosial tertentu. Ketiga, memperjuangkan masyarakat lebih demokratis dan setara. Langkah strategis untuk kebijakan *affirmative action* akan berhasil jika diikuti langkah strategis yakni menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan mendapatkan haknya untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan upah yang adil. Serta memberi dukungan pada tumbuh kembangnya organisasiorganisasi perempuan, yang menjadi sekolah pertama bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan publik. Sejatinya, perjuangan dalam politik dan mewujudkan representasi politik perempuan (yang bukan sekedar warna, tapi turut mewarnai) di negeri ini sepertinya masih butuh waktu panjang dan perjuangan yang kuat untuk dibuktikan, karena ini menyangkut kapabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bersaing dan mampu berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan.

Dalam masyarakat yang terlanjur meyakini kodrat perempuan sebagai makhluk lemah dan agak sensitif, jelas dibutuhkan upaya ekstra keras khususnya oleh KOPRI guna mengonstruksi isu representasi politik perempuan dalam bingkai demokrasi yang setara dan partisipatif dan wacana gender dalam frame pluralism demokratis (non-patriarkis) sebagai prioritas kebijakan ke depan agar tatanan masyarakat demokratis yang berkeadilan jender bisa sungguh-sungguh terwujud di negeri ini. Dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan, dengan melibatkan pemangku kepentingan semua pihak yang menjadi pelaku politik khususnya partai politik, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah melalui instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang lebih meluas dan terencana bagi perempuan. Oleh karena itu anggota KOPRI dirasa sangat perlu untuk meng*upgrade* kapasitas diri untuk dapat mengisi dan menjawab berbagai aturan yang telah dirumuskan untuk menyamakan hak perempuan,

18 Koalisi Perempuan Indonesia, Tindakan Khusus Sementara : Menjamin Keterwakilan Perempuan, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Oktober 2002, hlm. 2

sehingga aspirasi dan kehidupan perempuan yang belum mencapai kesetaraan dapat tertolong.

Gerakan KOPRI harus terus melakukan advokasi dan edukasi kritis pada semua level komunitas perempuan. Beragam perspektif analisis untuk melihat penindasan sistemik yang dialami perempuan harus diperkenalkan, seperti analisis feminis Marxian (untuk membedah penindasan yang dialami oleh buruh perempuan); analisis gerakan feminis Dunia Ketiga (untuk membedah penindasan perempuan dalam konteks kultur, religi, dan bentukbentuk kekerasan negara); atau analisis ekofeminis (untuk mengkaji ketertindasan perempuan dari aspek lingkungan dan sumber-sumber penghidupan alamiah). Beragam perspektif dan strategi perjuangan perempuan yang ada sesungguhnya tak hanya efektif digunakan sebagai alat pencerdasan dan penyadaran, tapi lebih dari itu sebagai instrumen dalam membangun koalisi besar gerakan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, toleransi, dan demokrasi.

5. Visi dan Misi Kopri

a. Visi: Terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
b. Misi: Mengideologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender

6. Tujuan Kopri

a. Menciptakan kader ulul albab
b. Penguatan intelektual dan kemandirian kader
c. Mecetak kader yang memiliki loyalitas dan kesetiaan terhadap organisasi.
d. Membentuk kader yang militan dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai pergerakan.
e. Membentuk kader pelopor, pembaharu dan kreator

7. Fungsi Kopri

a. KOPRI berfungsi sebagai wadah bagi gerakan perempan muslimah masa kini.
b. KOPRI berperan menjadi pembawa nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdhiyyah
c. KOPRI turut mendukung kebijakan yang pro rakyat
d. KOPRI berfungsi sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten membersamai masyarakat dalam berbagai issu.

BAB III
SISTEM KADERISASI KOPRI

A. Pandangan Umum Kaderisasi

1. Profil Kader Kopri PRIMA

Kopri sebagai ruang pengembangan kapasitas, kreativitas dan inovasi harus bisa menjawab perkembangan yang saat ini berjalan. Tentu ini harus sejalan dengan role model kaderisasi di PMII. Sehingga seluruh kader ke depan tidak gagap dalam menyikapi transformasi kaderisasi yang akan diusung dengan mencakup berbagai bidang profesional lainnya. Kopri harus bisa membuat produk dan kebijakan kaderisasi yang bersifat elastis, hal itu karena formulasi dan model kaderisasi yang ada di setiap lokalnya memiliki kultur, budaya dan tantangan yang berbeda. Semua itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tipologi karakter kader Kopri di setiap kampus tertentu. Dari membangun citra diri organisasi, menguraikan permasalahan, analisis kebijakan, diskusi, pertarungan perebutan kader, ruang-ruang strategis, hingga pertarungan gagasan.

Mengingat banyaknya potensi kader Kopri yang tersebar di seluruh Indonesia, maka kader Kopri harus memegang dua prinsip, yaitu Kopri harus mandiri dan maju. Dimana kader Kopri harus memiliki jiwa pemimpin yang matang, berani, dan bertanggungjawab, serta memiliki mental yang kuat, keilmuan yang mumpuni dan spiritual yang tinggi. Dengan menata ulang Gerakan Kopri dari ranah filosofis menuju langkah kongkret. Transformasi kaderisasi multidimensi yang dicanangkan akan menjadi sistem baru untuk

memperbaiki dan memaksimalkan potensi yang dimiliki seluruh kader Kopri.
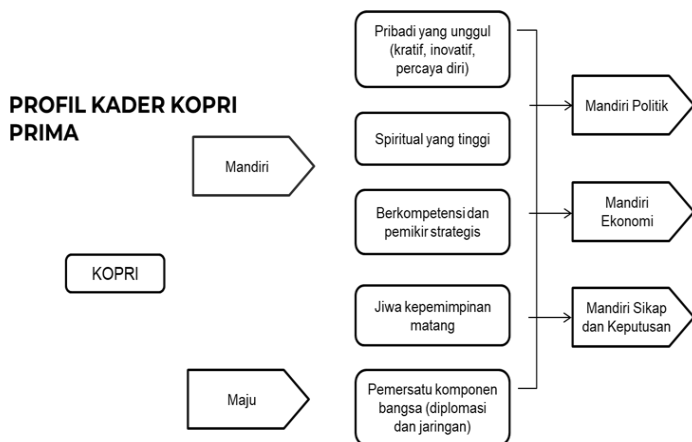
2. Model Kaderisasi Kopri

Kopri adalah bagian dari PMII yang diharapkan bisa menjadi gerakan perempuan yang mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi garda depan dalam perannanya menjawab problematika zaman. Dalam menjalankan roda organisasi, dalam Kopri harus menjalankan kaderisasi yang berfungsi untuk meneruskan estafet kepemimpinan baik di tingkat local maupun nasional, selain itu juga untuk menjaga nilai-nilai nasionalisme dan religious. Hal ini yang harus dilakukan oleh kader-kader Kopri untuk memberikan peran dan kontribusi jangka panjang untuk menjaga dan ikut serta membangu citacita bangsa.

Kopri dengan Berideologikan Ahlussunah Wal Jama'ah hendaknya bisa mengurai secara sistematis tentang Aswaja dan melakukan pembacaan ulang konteks kekinian terkait kebutuhan mendasar bagi permasalahan kaum perempuan. Dimana manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan semakin merajalela, marginalisasi, stereotype, subordinasi atau penomorduaan, kekerasan dan beban ganda sangat erat dengan perempuan. Namun persoalan sekarang bukan hanya fokus pada ketidakadilan gender dan bagaimna agar gerakan perempuan berusaha melakukan pemberdayaan perempuan.[19]

Dengan landasan dan ideologi yang kuat serta diiringi dengan tujuan luhur inilah, yang seharusnya menjadian kader KOPRI memiliki kesadaran dan semnagat membangun diri dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang

19 Strategi pengembangan Kopri "Keputusan-Keputusan" Muspimnas 2019

lebih baik. Hail ini diperkuat dengan nilai-nilai yang tertuang dalam ideologi dan cita-cita.[20]

Berangkat dari nilai-nilai tauhid yang pada dasarnya memberikan semngat *rahmatallil'alamin* membawa system berfikir yang rasional dan objketif untuk keadilan kemanuasiaan. Kehadiran agama yang memberi nilainilai religious sebenarnya juga menjawab problem kemanusiaan. Menyuarakan keadilan (*al-'adl*), kebebasan (*al-hurriyah*), kesetaraan (*almusawwah*) dan memanusiakan manusia (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*).

Maka dari itu Kopri menyadari bahwa perempuan memiliki peran sebagai pemimpin di bumi keberadaannya akan menjadi rahmat bagi sgenap alam. karenanya Kopri harus mengambil peran dan posisi dalam problem perempuan dan kesempatan strategis. Untuk itu penguatan intelektual menjadi tugas sebagai organisasi kader, untuk membangun kapasitas kader agar memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi demi terwujudnya kesejahteraan bangsa.

Model kaderisasi yang diterapkan oleh KOPRI memberikan *outcome* sebagai transformasi:

a. Tranformasi kaderisasi Multidimensi yang di ambil untuk menjadi *Role Model* yaitu pembaharuan tata kelola kaderisasi yang diarahkan untuk memperkuat berbagai potensi kader.
b. Transformasi Teknologi; penggunaan teknologi akan menjadi salah satu penunjangnya. Konsep pelaksanaannya, keberadaan teknologi diintegrasikan secara maksimal mulai dari proses pendaftran, seleksi sampai pelaksanaannya disetiap kaderisasi formal maupun non formal KOPRI yang akan tetap dapat berjalan secara efektif dengan penggunaan inovasi program transformasi kaderisasi dibidang professional yang dapat digunakan sebagai *human resources distribution and openeducasional resources* yang memungkinkan seluruh kader KOPRI untuk melakukan *gathering and sharing.*
c. Transformasi Globalisasi Organisasi; Globalisasi secara sederhana adaah sesuaitu yang mendunia dan tanpa mengenal batas indikasinya adalah kemajuan teknologi yang pesat di bidang informasi, komunikasi, dan trnasportasi. Globalisasi merupakan keniscayaan, dunia makin terbuka, Negara-negara saling berhubungan dan perekenomiannya saling ketergantungan. [21]

20 Buku Panduan Modul Kaderisasi PB PMII tahun 2017-2021
21 Cipto, Bambang.2007. *Hubungan Internasional Asia tenggara, Teropong Dinamika, Re-*

Kopri harus siap dan hadir dengan globalisasi yang ada dengan terorganisir, harus menyiapkan potensi yang awalnya mampu dilingkungan domestik bergeser menjadi kancah nasional. Siap dengan kondisi perubahan secara teknologi dan mampu bersaing dengan kondisi sosial yang semakin berkembang dan maju.

B. Konsep Kaderisasi

1. Pengertian

Dari model kaderisasi yang diterapkan Kopri bertujuan agar Kopri menjadi kader yang mandiri dan maju (KOPRI PRIMA), mengingat banyaknya potensi kader KOPRI yang tersebar diseluruh Indonesia, maka kader Kopri harus memegang dua prinsip yaitu Kopri harus mandiri dan maju. Dimana kader Kopri harus memiliki jiwa pemimpin yang matang, berani dan bertanggung jawab, serta memiliki mental yang kuat, keilmuan yang mumpuni dan serta spriritual yang tinggi. Dengan menata ulang gerakan KOPRI dari ranah filosofi menuju langkah kongkrit. Transformasi kaderisasi multidimensi yang dicanangkan akan menjadi system baru untuk memperbaiki dan memaksimalkan potensi yang dimiliki seluruh kader KOPRI.

Konsep dasar Kaderisasi Kopri, dalam prosesnya kader Kopri diharapkan kuat dalam 3 elemen, yaitu kuat secara ideology dan kultural, kuat secara gerakan dan kuat secara keprofesian. Yang kemuadian mampu menjadi kader KOPRI yang mandiri dan Maju. Mandiri disini kader Kopri Mampu menjadi pribadi yang unggul, spiritual yang tinggi, berkopetensi dan berfikir strategis dan memiliki jiwa kepemimpianan yang matang, yang kemudian mandiri dsisini memiliki tiga prinsip yaitu, mandiri politik, madiri ekonomi dan mandiri sikap da keputusan. Sedangkan maju, kader KOPRI sebagai pemersatu komponen bangsa mampu membangun diplomasi dan jaringan.

Kaderisasi yang produktif dan terarah merupakan konsep yang harus menjadi pedoman utama dalam proses pengkaderan. Penguatan kader secara intelektual, skill dan kemandirian menjadi tolak ukur keberhasilan dalam peoses kaderisasi. Selain itu, Tiga elemen dasar Kaderisasi tidak lepas dari satu kesatuan yang terikat yaitu fisikal, spiritual dan intelektual. Kombinasi ini adalah menjadi tanggung jawab yang menjadi ghiroh gerakan dalam pengkaderan.

2. Tujuan

Sebagai bagaian dari PMII, KOPRI harus mampu menjadi penggerak

---

alitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.224

gerakan perempuan yang mengedepankan nilai pergerakan dan menjadi garda depan dalam berperan menjawab problematika jaman. Dalam menjalankan roda organisasi, kaderisasi memiliki peran yang sangat urgen.Kaderisasi selain berfungsi untuk menyiapakan estafet kepemimpinan baik tingkat local maupun nasional juga harus mampu menjadi penjaga keberlangsungannya nilai nilai nasionalisme dan religiusitas gerakan.Hal ini bukan semata mata untuk menegaskan eksistensi organisasi saat ini, namun juga untuk memberikan peran dan kontribusi jangka panjang yang membangun bagi Bangsa dan Negara.

Kaderisasi sebagai inti dari nafas organisasi, harus mampu menerjemahkan visi jangka panjang organisasi dengan melakukan agenda kaderisasi secara maksimal, sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi dan skill kader dan pengurus. Tujuannya adalah untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas yaitu menciptakan kader yang Ulul Albab, penguatan intelektual dan kemandirian kader, mencetak kader yang memiliki loyalitas dan kesetiaan terhadaporganisasi, membentuk kader yang militan dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai pergerakan dan Membentuk kader pelopor, pembaharu dan kreator.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa kita analogikan organisasi sebagai pohon, makhluk yang tumbuh dan berkembang. Bukan sekedar kebendaan yang hanya ada dan memiliki fungsi saja. Lebih dari itu, organisasi juga perlu dirawat dijaga kelangsungannya.Sebagai sebuah pohon, yang memiliki fase tumbuh kembang dan pada akhirnya menua dan harus diregenerasi dengan menanam bibit. Organisasi pun demikian, perlu dijaga kelangsngannya dan harus menyiapkan regenerasi kader muda untuk dipersiapkan sebagai pengganti kader sebelumya. Hal ini dianggap urgen karena kaderisasi tidak sekedar menjaga keberadaan dan kelangsungan organisasi saja, namun juga berperan menjaga keberadaan nilai dan ideologi serta tujuan mulia organisasi.

Adapun dari tujuan kaderisasi di atas dengan harapan supaya kader-kader KOPRI mampu bergerak untuk sebuah perubahan dan mepersiapkan mental untuk mampu bersaing dalam hal apapun (dalam dinamika perubahan zaman yang semakin cepat dan selektif). Dalam pelaksaan kaderisasi ini bukan hanya untuk kegiatan ceremonial semata tetapi dengan harapan besar kader bisa mengimpelemntasikan semua yang mereka dapatkan selama mengikuti jenjang kaderisasi di PMII maupun di KOPRI, dengan nilai-nilai keIslamanan yang telah di ajarkan, terus memperdalam intelektual, meningktakna skil yang dimiliki, tetap mempertahankan nama baik lembaga dan yang terpenting adalah kader Kopri harus mampu bersaing dalam ranah apapun dengan skil

yang dimiliki

3. Metode

Dalam pelaksanaan kelas kaderisasi dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Ceramah
b. Role Play
c. Studi Kasus
d. Simulasi
e. FGD
f. Brain Storming

4. Media

Adapun media yang digunakan dalam pelaksaan kaderisasi yaitu :

a. *Sticky cloth*
b. Spidol
c. Papan Tulis (White Board)
d. Kertas plano
e. Kertas metaplan
f. Lakban
g. LCD Proyektor
h. Koneksi Internet
i. Laptop
j. Alat Peraga (untuk simulasi/role play)

C. Metodologi Kaderisasi Formal

1. Selama pelatihan berlangsung, calon anggota/kader akan dididik oleh tim fasilitator dengan lima hal:
    a. Mengembangkan pengetahuan
    b. Menguatkan emosional
    c. Menegakkan kedisiplinan
    d. Menguatkan spiritualitas dengan melaksanakan Mujahadah, Tahajjud di malam hari, dan Sholat fardhu berjamah
    e. Penempaan fisik dengan olahraga

2. Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Pengetahuan yang akan disampaikan oleh narasumber dan fasilitator dalam kaderisasi formal KOPRI, terutama materi pemahaman yang menggunakan pisau analisis gender dengan cara internalisasi sehingga akan menghasilkan pemikiran dan pergerakan yang berkeadilan gender.
   b. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik secara ketat dan disiplin, dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut:
      1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar; meja, kursi, laptop, jaringan internet dan alat pendukung lainnya, yaitu:
         a) Kertas metaplan ukuran 10 x 15 cm secukupnya
         b) Spidol besar (whiteboard dan/atau marker) secukupnya
         c) Spidol kecil secukupnya (sesuai jumlah peserta)
         d) Papan tulis, Kertas Plano dan/atau Proyektor
      2) Sesi belajar dimulai dari pukul 08.00-22.00 waktu setempat, dan selama belajar peserta wajib menggunakan baju kemeja, jas PMII, sepatu, kerudung dan membawa perlengkapan alat tulis
      3) Selama sesi belajar, peserta dilarang merokok, mengaktifkan telepon genggam dan meninggalkan materi
      4) Setiap malam dilaksanakan Mujahadah, yaitu bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat-sholat sunnah, wirid, baca Al-Qur'an dan mengikuti nasihat agama yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni setempat atau panitia dan peserta dengan mengunakan pakaian Muslimah
      5) Peserta diwajibkan melakukan olahraga pagi, senam baris-berbaris, yang dipandu oleh fasilitator olahraga, dengan menggunakan pakaian baju kaos, celana training dan sepatu olahraga
3. Pre-test dan Post-test
   a. Di awal dan akhir proses pelaksanaan kaderisasi formal

KOPRI diadakan pengisian *pre-test* dan *post test*

b. Tujuan *pre-test* dan *post test* adalah untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan terhadap nilai dan materi kaderisasi formal KOPRI yang akan ditempuh

c. Ketentuan *pre-test* dan *post test* adalah

    1) Soal *pre-test* dan pos test disediakan oleh Bidang Kaderisasi KOPRI PB PMII

    2) *Pre-test* kaderisasi formal KOPRI dilaksanakan bersamaan dengan pra kurikula atau pengenalan awal fasilitator dalam proses kaderisasi formal

    3) Hasil pengisian *pre-test* diolah oleh instuktur kaderisasi dan digunakan sebagai acuan untuk mengelola forum, baik untuk penguatan keilmuan dan pemahaman terhadap nilai serta materi kaderisasi atau penguatan disiplin peserta

    4) Post test dilaksanakan setelah *general review* oleh fasilitator

4. Konseling

    a. Di akhir sesi pengkaderan, tim fasilitator memanggil para peserta secara bergantian untuk dilakukan proses konseling.

    b. Konseling dimaksudkan untuk memberikan ruang konsultasi mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh peserta setelah mengikuti pelatihan, untuk membuat *goal setting* pribadi dan pengembangan KOPRI

    c. Proses konseling dilakukan dalam bentuk dialog antara fasilitator dengan peserta, dengan pembahasan mengenai:

        1) Kesan, pesan dan harapan dalam berproses di PMII

        2) Tangangan dan hal baik yang muncul di pelatihan yang pernah diikuti

        3) Kondisi Kopri di tempat peserta berproses (Rayon/Komisariat/Cabang/PKC)

D. Mekanisme Kaderisasi

1. Ruang Lingkup Strategi Pelaksanaan

    a. Sekolah Islam dan Gender (SIG) adalah kaderisasi formal KOPRI pertama pasca MAPABA yang diikuti oleh anggota PMII

b. Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah kaderisasi pasca SIG dan SKK yang diikuti oleh KOPRI

c. Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) adalah kaderisai pasca SKK dan PKL yang diikuti KOPRI

2. Sertifikasi

a. Sertifikat SIG adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta SIG oleh penyelenggara yang ditandatangani penyelenggara dan mengetahui struktur di levelnya, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jika diselenggarakan oleh Pengurus Kopri Rayon, maka ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri Rayon dan ketua Kopri Komisariat

2) Jika diselenggarakan oleh Pengurus Kopri Komisariat, maka ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri Komisariat dan ketua Kopri Cabang

b. Sertifikat SKK adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta SKK oleh penyelenggara yang ditandatangani penyelenggara dan mengetahui struktur di levelnya, dengan rincian sebagai berikut:

1) Jika diselenggarakan oleh Pengurus Kopri Cabang, maka ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri Cabang dan Ketua KOPRI PKC PMII

2) Jika diselenggarakan oleh Pengurus Kopri Koordinator Cabang, maka ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri PKC dan Ketua KOPRI PB PMII

c. Sertifikat SKKN adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta SKKN oleh Penyelenggara yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri PB PMII.

3. Evaluasi dan Verifikasi

Evaluasi dilakukan untuk melakukan penilaian kualitatif atas atas kegiatan sekolah atau pelatihan yang dilakukan KOPRI untuk meningkatkan kualitas kaderisasi dalam melaksanakan program. Dalam kegiatan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan kaderisasi baiknya melakukan tahapan penting untuk mendudung satu sama

lainnya:

a. Menentukan evaluasi kegiatan kaderisasi atau program kaderisasi yang sudah dilakukan.
b. Merancang evaluasi kegiatan kaderisasi atau program kaderisasi agar aspek dan pelaksananya focus
c. Pengumpulan data baik data kegiatan kaderisasi baik informasi atau materi.
d. Mencatat dan pengolahan data yang di dapat dan hasil-hasil evaluasi kegiatan kaderisasi.
e. Pelaporan hasil evaluasi, untuk menjadi acuan kegiatan kaderisasi dikemudian hari

Verifikasi dilakukan untuk pemeriksaan yang dilakukan KOPRI tentang hasil laporan kegiatan Kaderisasi. Verifikasi menjadi bagian penting pada saat melakukan penyusunan hasil kegiatan kaderisasi. Hal ini digunakan sebagai bukti bahwasannya laporan kegiatan kaderisasi di buat sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Yang bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadapa kegiatan kaderisasi adalah sesuai dengan jajaran kegiatan kaderisasi sebagai berikut:

a. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PR maka Ketua panitia melaporkan kepada Ketua KOPRI Rayon.
b. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PK maka Ketua panitia melaporkan kepada Ketua KOPRI Komisariat.
c. Jika diselenggarakan oleh KOPRI PC maka Ketua panitia melaporkan kepada Ketua KOPRI Cabang.
d. Jika diselenggarakan oleh PKC maka Ketua panitia melaporkan kepada Ketua KOPRI PKC.
e. Jika diselenggarakan oleh PB KOPRI maka Ketua panitia melaporkan kepada Ketua KOPRI PB PMII

4. Kelayakan Mendapatkan Sertifikat

   Kelayakan anggota/kader mendapatkan sertifikat meliputi:

   a. Kedisiplinan dalam mengikuti proses SIG/SKK/SKKN
   b. Pemahaman terhadap materi-materi wajib yang disampaikan

5. Syarat-Syarat Mendapatkan Sertifikat

   a. Sertifikat SIG

1) Mengikuti semua prosesi materi-materi SIG hingga pembaiatan
2) Memahami materi-materi (presentasi dalam General Review)
3) Telah menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

b. Sertifikat SKK
1) Mengikuti semua prosesi SKK
2) Presentasi individu materi-materi SKK dalam General review
3) Mengikuti pembaiatan
4) Telah menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
5) Post test menguasai 70% dari materi wajib

c. Sertifikat SKKN
1) Mengikuti semua prosesi SKKN
2) Presentasi individu materi-materi SKKN dalam General review
3) Mengikuti pembai'atan
4) Telah menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
5) Post test nilai rata-rata minimal 70 (0-100)

6. Sistematika laporan penugasan Peserta SIG, SKK dan SKKN

Sistematika laporan penugasan Peserta SIG, SKK dan SKKN sekurang-kurangnya:

a. Pernyataan dari anggota yang jadi peserta (melampirkan daftar nama-nama anggota: nama, tempat tanggal lahir, fakultas, universitas, alamat, tempat tinggal, alamat email, nomor handphone, lampiran daftar nama-nama pemateri pada SIG dan atau SKK diselenggarakan)
1) Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal 6 (enam) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan SIG dan atau SKK).
2) Laporan penugasan peserta SIG dan atau SKK ditandatangani mengetahui oleh pengurus KOPRI penyelenggara kegiatan.
3) Laporan penugasan peserta SKKN ditandatangani

mengetahui oleh KOPRI PC atau KOPRI PKC yang merekomendasikan peserta SKKN kepada penyelenggara dan tembusan ke KOPRI PB PMII.

b. Mekanisme Penyampaian laporan penugasan oleh peserta SIG,SKK dan SKKN:

1) Peserta SIG,SKK,SKKN berkoordinasi dengan SC penyelenggara terkait perkembangan selama masa penugasan.

2) Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan tembusan kepada struktur diatasnya, kecuali penugasan SKKN tembusan kepada Mabinas.

7. Mekanisme Pemberian Sertifikat

a. Jika setelah kegiatan kaderisasi (SIG/SKK/SKKN) penyelenggara (PK/PC/PKC) melakukan RTK/ Konfercab/Konkoorcab, pengawalan Sertifikat masih tetap menjadi tanggungjawab institusi penyelenggara (SC SIG/SKK/SKKN)

b. Secara teknis, penyelenggara mengeluarkan Sertifikat sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti sejak awal hingga akhir dengan format mengetahui struktur di levelnya. Sertifikat tersebut disetorkan kepada struktur di levelnya, untuk kemudian ditandatangani (mengetahui), yang selanjutnya diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus oleh struktur diatasnya.

E. Unsur Pelaksana Kaderisasi Formal

1. Unsur Pelaksana kaderisasi formal KOPRI adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan

2. Unsur Pelaksana kaderisasi formal KOPRI adalah sebagai berikut:

a. Panitia

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas panitia adalah:

1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal
2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan fasilitator
3) Bersama penyelenggara menentukan moderator dan notulis beserta rincian kerjanya
4) Mempersiapkan sertifikat untuk panitia, narasumber, fasilitator, moderator dan notulis
5) Bersama dengan SC dan fasilitator merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta
6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal
7) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal
8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal
9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal
10) Dan Syarat menjadi Panitia SIG minimal telah mengikuti SIG
11) Syarat menjadi Panitia SKK yaitu minimal telah mengikuti SKK

b. Moderator

Moderator kaderisasi formal KOPRI adalah anggota/ kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas moderator adalah sebagai berikut:

1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah
2) Mengatur proses dialog
3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog
4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulan

materi kepada fasilitator

c. Notulis

Notulis kaderisasi formal KOPRI adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:

1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi
2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca
3) Menyiapkan kebutuhan fasilitator yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

d. Petugas Forum

Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan fasilitator yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:

1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta fasilitator ketika memandu sesi
2) Melayani kebutuhan atau perlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal KOPRI yang berkaitan dengan proses berlangsungnya forum.

3. Narasumber Kaderisasi Formal Kopri

a. Narasumber SIG adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, dan menguasai materi yang disampaikan. Narasumber dalam SIG mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Kader PMII yang minimal telah mengikuti SIG dan/atau pelatihan fasilitator, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaran Pengurus Komisariat dan/atau Pengurus Cabang
2) Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi
3) Tokoh masyarakat, akademisi atau professional dari unsur NU yang dipandang memiliki kompetensi

4) Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi

b. Narasumber SKK adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan materi tertentu sebagaimana diminta oleh Panitia SKK. Narasumber selain harus menguasai materi yang ditentukan juga memahami tujuan materi serta memahami tujuan diselenggarakannya SKK. Narasumber dalam SKK mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   1) Kader PMII yang minimal telah mengikuti SKK/PKL dan Pelatihan Fasilitator, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaran Pengurus Cabang
   2) Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi
   3) Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur NU yang dipandang memiliki kompetensi
   4) Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi

c. Narasumber SKKN adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan materi tertentu sebagaimana diminta oleh Panitia SKKN. Narasumber selain harus menguasai materi yang ditentukan juga memahami tujuan materi serta memahami tujuan diselenggarakannya SKKN. Narasumber dalam SKKN mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   1) Kader PMII yang minimal telah mengikuti SKKN/PKN dan follow up nya serta pelatihan fasilitator, dipandang memiliki kemampuan dan minimal aktif di jajaran Pengurus Besar
   2) Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kemampuan dengan bidang materi yang akan disampaikan
   3) Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur NU yang dipandang memiliki kemampuan dalam bidang materi yang bersangkutan
   4) Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan pertanyaan sesuai tujuan materi

4. Fasilitator Kaderisasi Formal Kopri
   a. Fasilitator SIG adalah kader yang minimal telah mengikuti SIG, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SIG, mendapat rekomendasi dari Pengurus Komisariat.
   b. Fasilitator SIG dalam satu kelas berjumlah maksimal tiga orang. Fasilitator saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya
   c. Tugas fasilitator dalam SIG adalah sebagai berikut:
      1) Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas fasilitator untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan
      2) Selalu mendampingi narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung
      3) Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SIG dll)
      4) Menilai dan mengevaluasi hasil *pre-test* dan post test SIG
      5) Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait SIG di awal kegiatan
      6) Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka terhadap seluruh materi SIG di akhir kegiatan
      7) Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SIG
      8) Mengantarkan dan mengakhiri sesi sebelum dan setelah materi dipandu oleh moderator
      9) Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir
      10) Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan SIG
      11) Fasilitator mendorong peserta untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pemikirannya

12) Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta yang membantu proses belajar atau komunikasi menjadi lebih efektif
13) Fasilitator membantu peserta dalam pembelajaran bersama atau kelompok untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan peserta

d. Fasilitator SKK adalah kader yang minimal telah mengikuti pelatihan fasilitator wilayah atau pelatihan fasilitator nasional, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SKK

e. Fasilitator SKK berjumlah maksimal tiga orang. Mereka bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai Fasilitator

f. Syarat menjadi Fasilitator SKK adalah:
   1) Telah lulus mengikuti pelatihan fasilitator yang diselenggarakan oleh minimal Pengurus Koordinator Cabang, dibuktikan dengan sertifikat
   2) Mampu memahami agama dan komitmen ibadah yang baik, meliputi;
      a) Bisa membaca Al-Qur'an beserta dengan tajwidnya
      b) Memahami rukun islam dan rukun iman dengan baik
      c) Memahami dan mengamalkan amaliyah fardhu dan sunah dengan baik
      d) Memahami dan mengamalkan amaliyah NU dengan baik
   3) Menguasai minimal tiga materi pengkaderan SKK dengan baik

g. Tugas Fasilitator SKK adalah sebagai berikut:
   1) Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas fasilitator yang memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta dapat memahami materi yang disampaikan
   2) Selalu mendampingi di antara narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung

3) Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SKK)
4) Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari SKK di awal kegiatan
5) Menilai dan mengevaluasi hasil *pre-test* dan post test SKK
6) Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka terhadap seluruh materi SKK di akhir kegiatan
7) Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SKK
8) Mengantarkan dan mengakhiri sesi sebelum dan setelah materi dipandu oleh moderator
9) Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan SKK
10) Menemani narasumber serta memberikan komentar atau pertanyaan kritis untuk memancing dan mengarahkan perhatian peserta
11) Membuat kesimpulan-kesimpulan khusus di setiap sesi dan kesimpulan umum yang merangkai keseluruhan materi dari setiap sesi
12) Fasilitator mendorong peserta untuk ercaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pemikirannya
13) Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta yang membantu proses belajar atau komunikasi menjadi lebih efektif
14) Fasilitator membantu peserta dalam pembelajaran bersama atau kelompok untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan peserta

h. Fasilitator SKKN adalah kader yang minimal telah mengikuti pelatihan fasilitator nasional KOPRI, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SKKN, dibuktikan dengan sertifikat
i. Fasilitator SKKN berjumlah dua sampai tiga orang dan dapat bertugas secara bergantian
j. Syarat Fasilitator SKKN adalah:

1) Telah lulus mengikuti pelatihan fasilitator yang diselenggarakan oleh KOPRI PB PMII, dibuktikan dengan sertifikat
2) Mampu memahami agama dan komitmen ibadah dengan baik, meliputi;
   a) Bisa membaca Al-Qur'an beserta dengan tajwidnya
   b) Memahami rukun islam dan rukun iman dengan baik
   c) Memahami dan mengamalkan amaliyah fardhu dan sunah dengan baik
   d) Memahami dan mengamalkan amaliyah NU dengan baik
3) Menguasai minmal tiga materi pengkaderan SKKN secara baik

k. Tugas-tugas fasilitator SKKN adalah:
   1) Memberikan orientasi kepada peserta mengenai tujuan SKKN, materi-materi dan metode yang digunakan dalam SKKN
   2) Memantau perkembangan forum secara utuh serta memberikan alternatif solusi ketika forum mengalami stagnasi
   3) Menggali pengetahuan, pengalaman dan pendapat peserta dalam setiap sesi SKKN
   4) Menemani Narasumber dalam proses pemberian materi serta memberikan komentar atau pertanyaan kritis untuk memancing dan mengarahkan perhatian peserta
   5) Membangun konsentrasi peserta untuk tetap fokus pada materi yang tengah dibahas
   6) Membuat kesimpulan khusus di setiap sesi dan kesimpulan umum yang merangkai keseluruhan materi dari setiap sesi
   7) Memberikan orientasi lanjutan bagi peserta setelah mengikuti SKKN
   8) Menegakan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan SKKN

9) Fasilitator mendorong peserta untuk ercaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pemikirannya

10) Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta yang membantu proses belajar atau komunikasi menjadi lebih efektif

11) Fasilitator membantu peserta dalam pembelajaran bersama atau kelompok untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan peserta

F. Kurikulum dan Silabus Kaderisasi Formal Kopri

1. Kurikulum SIG, SKK, dan SKKN

a. SIG

No	Materi	Status	Waktu
1.	Gender I	Wajib	120 menit
2.	Konsep Dasar Islam	Wajib	120 menit
3.	Al-Quran Hadits Perspektif Gender	Wajib	120 menit
4.	Fiqih Perempuan	Wajib	120 menit
5.	Hukum Islam di Indonesia	Wajib	120 menit
6.	Ke-Organisasi-an	Wajib	120 menit
7.	Citra Diri KOPRI	Wajib	120 menit

b. SKK

No	Materi	Status	Waktu
1.	Gender II	Wajib	120 menit
2.	Gerakan Perempuan di Indonesia	Wajib	120 menit
3.	Teknik Lobby dan Penguatan Jaringan	Wajib	120 menit
4.	Penguasaan Media	Wajib	120 menit
5.	Arah Gerakan KOPRI	Wajib	120 menit
6.	Sinergi KOPRI dengan Gerakan Multi Sektor	Wajib	120 menit
7.	Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	Wajib	120 menit
8.	Sejarah Gerakan Perempuan Lokal	Pilihan	90 menit

c. SKKN

No.	Materi	Status	Waktu
1.	Gender III	Wajib	120 menit

2.	Strategi Pengelolaan SDA Perspektif Ekofeminisme	Wajib	120 menit
3.	Strategi Kedaulatan Pangan Berbasis Keadilan Gender	Wajib	120 menit
4.	Historiografi NU	Wajib	120 menit
5.	KOPRI Perspektif Ideologi Politik dan Organisasi	Wajib	120 menit
6.	Community Organizing	Wajib	120 menit
7.	Geo Ekonomi, Geo Politik dan Geostrategi Gerakan Perempuan	Wajib	120 menit

2. Silabus SIG, SKK, dan SKKN

a. SIG

No	Materi	Deskripsi Materi	Kisi-Kisi Materi	Target Konstruksi Berfikir	Referensi Primer
SIG					
1	Gender I	1. Konsep Gender 2. Isu-Isu Gender 3. Prinsip Kesetaraan Gender CEDAW	1. Pengertian Seks, Gender, dan Seksualitas 2. Konstruksi gender, titik fokus konstruksi gender (sifat & karakter, ide & nilai, ruang & tanggungjawab), ruang lingkup konstruksi gender, pihak-pihak yang berperan penting dalam mengembangkan konstruksi adil gender 3. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender; double burden, stigmatisasi/stereotype/pelabelan, dan kekerasan (fisik, psikis, ekonomi, seksual) 4. Analisis gender, tujuan analisis gender, indikator kunci analisis gender (orientasi perspektif adil gender, 5 bentuk ketidakadilan gender dan APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat) 5. Prinsip Kesetaraan Gender CEDAW; Prinsip Kesetaraan Substantif, Prinsip Non Diskriminatif, dan Prinsip Kewajiban Negara	1. Peserta memahami Pengertian Seks, Gender, dan Seksualitas 2. Peserta memahami Konstruksi gender, titik fokus konstruksi gender (sifat & karakter, ide & nilai, ruang & tanggungjawab), ruang lingkup konstruksi gender, pihak-pihak yang berperan penting dalam mengembangkan konstruksi adil gender 3. Peserta memahami bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender; double burden, stigmatisasi/stereotype/pelabelan, dan kekerasan (fisik, psikis, ekonomi, seksual) 4. Peserta memahami gender, tujuan analisis gender, indikator kunci analisis gender (orientasi perspektif adil gender, 5 bentuk ketidakadilan	1. Pengantar Gender dan Feminisme, Alfian Rokhmansyah, Garudhawaca, Yogyakarta:2016 2. Sex, Gender, Sexuality and the Law: Social and Legal Issues Faced by individuals, Couples, and Families, Samantha Haedy dkk, Thomson Reuters, 2016 3. Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Satra Feminisme, Alfian Rokmansyah Garudhawaca, Yogyakarta:2016 4. Keadilan Gender: Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur

				gender dan APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat) 5. Peserta memahami Kesetaraan Gender CEDAW; Prinsip Kesetaraan Substantif, Prinsip Non Diskriminatif, dan Prinsip Kewajiban Negara	Tengah, Free Hearty, YPOI, Jakarta:2015 5. Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, Rosemarie Putnam Tong, Jalasutra, Yogyakarta:2017 6. Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar, Soenarjati Djajanegara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2000 7. Feminin, Ris Therik, Endang, Jakarta:1978 8. Women, Poverty, Equality: The Role of CEDAW, Megan Campbell, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon:2018
2	Konsep Dasar Islam		1. Makna Islam, Ihsan dan Iman 2. Misi Dasar Ajaran Islam	1. Peserta Memahami Makna Islam, Ihsan dan	1. Dasar-Dasar Memahami Iman,

			3. Tauhid dan Pembebasan Manusia 4. Konsep Kekhilafahan Manusia dalam Islam 5. Prinsip Keadilan Gender dalam Konsep Tauhid dan Kekhilafahan	Iman 2. Peserta Memahami Misi Dasar Ajaran Islam 3. Peserta Memahami Tauhid dan Pembebasan Manusia 4. Peserta Memahami Konsep Kekhilafahan Manusia dalam Islam 5. Peserta Memahami Prinsip Keadilan Gender dalam Konsep Tauhid dan Kekhilafahan	Islam dan Ihsan, Ipnu R. Noegroho, Jogjakarta:2019 2. Trilogi Islam: Islam, Iman dan Ihsan, Sachico Murata,dkk, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta:1997 3. Islam Yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam, M. Quraish Syihab, Lentera Hati, YogyakartaL 2018 4. Aspek-Aspek Pokok Agama Islam: Pandangan Islam tentang HAM, Hegemoni Barat sqn S Al-Qur'an Hadits Perspektif Gender olusi Dunia Modern, Hashemi Rafsanjani, Nuansa Cendekia, Bandung: 2008 5. Studi islam Komprehensif, Abuddin Nata, Kencana,

					Jakarta:2011 6. Theologi Islam, Hadis Purba dkk, Perdana Publishing, Medan:2016 7. Membedah tauhid Uluhiyyah Bersama Ulama Mazhab Syafi'I, Abdullah bin Abdul Aziz bun Abdullah Al-Anqary, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta:2017 8. Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan: Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim, Ahmet Kuru T, KPG, Jakarta: 2021
3	Al-Qur'an Hadits Perspektif Gender	1. Al-Qur'an dan Tafsir 2. Hadits dan Syarah	1. Pengertian Tafsir Qur'an, Asbabun Nuzul, dan Jenis-Jenis Tafsir 2. Ayat-Ayat yang ditafsirkan bias gender 3. Pengertian Hadits, Syarah Hadits, Asbabul Wurud, jenis-Jenis Hadits dan Tingkatannya 4. Hadits yang disyarah bias	1. Peserta Memahami Pengertian Tafsir Qur'an, Asbabun Nuzul, dan Jenis-Jenis Tafsir 2. Peserta Memahami Ayat-Ayat yang ditafsirkan bias gender 3. Peserta Memahami Pengertian Hadits, Syarah	1. Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, Zaitunah Subhan, PMG, 2015 2. Argumen Kesetaraan

			gender/Hadits Misogini	Hadits, Asbabul Wurud, jenis-Jenis Hadits dan Tingkatannya 4. Peserta Memahami Hadits yang disyarah bias gender/Hadits Misogini	gender:Perspwktif Aal-Qur'an, Nasaruddin Umar, Creatif Lenggara, Makassar:2017 3. Pengantar Al-Qur'an dan Hadis untuk Indonesia, Muh Alwi HS, 2020 4. Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan teknologi, Armahedi Mahzar, Mizan, bandung: 2004 5. Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an, Nasaruddin Umar, Creatif Lenggara, Makassar:2017 6. Studi Al-Qur'an dan Hadits, Umi Sumbulan dkk,UIN Maliki Press, Malang:2014 7. Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender

					dalam Tafsir Qur’an, Zaitunah Subhan, LKIS, Yogyakarta:2016 8. Islam Agama Ramah Perempuan, KH Husein Muhammad, Ircisod, Yogyakarta:2021 9. Islam Agama Ramah Perempuan: Memahami Tafsir Agama dengan Perspektif Keadilan Gender, Amirullah Ssyarbini, Asa Prima, Jakarta:2013 10. Perempuan Perspektif Islam, Yusuf Qardawi, Pustaka Fahima, Yogyakarta: 2006 11. Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran, Nurjannah Ismail, LKIS, Yogyakarta:2003
4	Fiqh Perempuan	1. Fiqh Madzhab 2. Fiqh Ibadah	1. Sosio-historis perkembangan fiqh madzhab (1)	1. Peserta Memahami Sosio-historis perkembangan	1. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas

		3. Fiqh Munakahat 4. Fiqh Muamalah Siyasah	2. Ulama perempuan dalam madzhab fiqh (1) 3. Hakikat Ibadah dalam Islam (2) 4. Status dan Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an dan Sunnah (2) 5. Ketentuan Hukum Islam Terkait Ibadah Perempuan; Ketentuan Thaharah (bersuci) bagi Perempuan, Ketentuan Hukum Haidh, Istihadhah, dan Nifas, Ketentuan Hukum Shalat, Zakat, Puasa, dan ibadah Haji, serta Ketentuan Hukum Jenazah Bagi Perempuan (2) 6. Makna, Dasar, dan Ruang Lingkup Fiqh Munakahat (3) 7. Hakikat Pernikahan dalam Islam (3) 8. Relasi Gender dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (3) 9. Humanisme Universal; Kesaksian Perempuan dalam Islam (4) 10. Peran Perempuan dalam Politik (4)	fiqh madzhab (1) 2. Peserta Memahami Ulama perempuan dalam madzhab fiqh (1) 3. Peserta Memahami Hakikat Ibadah dalam Islam (2) 4. Peserta Memahami Status dan Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an dan Sunnah (2) 5. Peserta Memahami Ketentuan Hukum Islam Terkait Ibadah Perempuan; Ketentuan Thaharah (bersuci) bagi Perempuan, Ketentuan Hukum Haidh, Istihadhah, dan Nifas, Ketentuan Hukum Shalat, Zakat, Puasa, dan ibadah Haji, serta Ketentuan Hukum Jenazah Bagi Perempuan (2) 6. Peserta Memahami Makna, Dasar, dan Ruang Lingkup Fiqh Munakahat (3) 7. Peserta Memahami Hakikat Pernikahan dalam Islam (3) 8. Peserta Memahami Relasi	Tafsir Wacana Agama dan Gender, KH Husein Muhammad, Ircisod, Yogyakarta: 2019 2. Fiqih Perempuan Kontemporer, Huzaemah T. Yanggo, AMP Press, 2016 3. Buku Pegangan Utama Fiqih Wanita, Majdah Amir, Media Kreativa, Jakarta: 2020 4. Fikih Ibadah Madzhab Syafi'I, Syaikh Alauddin Za'tari, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2019 5. Pedoman Lengkap Fikih Munakahat, Armia dkk, PMG, Jakarta:2019 6. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Tihami, M.A., dkk, Rajawali Press,

				Gender dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (3) 9. Peserts Memahami Humanisme Universal; Kesaksian Perempuan dalam Islam (4) 10. Peserta Memahami Peran Perempuan dalam Politik (4)	Jakarta:2009 7. Fikih Munakahat, Sudarto,M.Pd., Deepublish, Yogyakarta;2017 8. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Muhammad Iqbal, PMG, Jakarta:2014 9. Fiqih Perempuan Kontemporer, Farid Nu'man Hasan, Gema Insani, Malang:2018 10. Ketika Fiqh Membela Perempuan, Prof. Nasaruddin Umar, EMK, Jakarta:2014 11. Wanita Dalam Bingkai Empat Madzhab, Muhammad Utsman Aal-Khusyt Pustaka Yasir, Surabaya:2018
5	Hukum Islam di Indonesia		1. Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 2. Pembaharuan Pemikiran Hukum	1. Peserta Memahami Sejarah Perkembangan Hukum Islam di	1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Dr.

			Islam Ulama Indonesia; Syekh Arsyad Asshiddiqie, Hasbi as-Shiddiqie, Hazairin, Munawir Sadzali 3. Kompilasi Hukum Islam 4. UU No. 16 tahun 2019	Indonesia 2. Peserta Memahami Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Ulama Indonesia; Syekh Arsyad Asshiddiqie, Hasbi as-Shiddiqie, Hazairin, Munawir Sadzali 3. Peserta Memahami Kompilasi Hukum Islam 4. Peserta Memahami UU No. 16 tahun 2019	Jaih Mubarok, R.Rosdakarya, Bandung:2000 2. Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Wawan Hermawan, UPI Press, Bandung:2019 3. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Iskandar Usman, RGP, Jakarta:1994 4. Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Ghufron Ajib Mas'adi, RGP, Jakarta:1997 5. Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Aatas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, H.Mukhsin Nyak Umar, Turats, Banda Aceh: 2017 6. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Prof.

					Abdul Manan, Kencana Depok: 2017 7. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press, Bandung: 1991 8. Hukum Islam: Dilengkapi dengan Hukum Islam, Nunung Rodliyah, Graha Ilmu, Yogyakarta:2019 9. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, H. Abdurrahman, Akademi Pressindo, Jakarta:1992 10. Konsep Kesaksian: Perempuan dalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Tata Negara, Dr. Paisol Burlian, FDK UIN Raden Fatah, Palembang:2016
6	Ke-Organisasian		1. Kelembagaan Kopri; Sejarah, Struktur dan Jenjang	1. Peserta Memahami Kelembagaan Kopri;	1. AD/ART PMII 2. PO dan PPPK

			2. Aturan-Aturan Kopri; AD/ART, PO (PPPK) 3. Administrasi Kopri	Sejarah, Struktur dan Jenjang 2. Peserta Memahami Aturan-Aturan Kopri; AD/ART, PO (PPPK) 3. Peserta Memahami Administrasi Kopri	3. Buku Pedoman Kaderisasi Kopri 4. Modul Kaderisasi Kopri
7	Citra Diri Kopri	1. Nilai Kader Kopri 2. Strategi Pengembangan Diri	1. Definisi dan Jenis Citra Diri Kopri 2. Faktor Pembentuk Citra Diri Kopri 3. Konsep Nilai Kader Kopri 4. Perencanaan Pengembangan Diri (Self Planning Analisys) 5. Pengembangan Soft Skill dan Hard Skill diri sesuai bakat dan minat	1. Peserta Memahami Definisi dan Jenis Citra Diri Kopri 2. Peserta Memahami Faktor Pembentuk Citra Diri Kopri 3. Peserta Memahami Konsep Nilai Kader Kopri 4. Peserta Memahami Konsep Panca Norma Kopri 5. Peserta Mampu Membuat Perencanaan Pengembangan Diri (self Planning Analisys) 6. Peserta Mampu Melakukan Pengembangan Soft Skill dan Hard Skill diri sesuai bakat dan minat	1. Buku Pedoman Kaderisasi Kopri 2. Modul Kaderisasi Kopri 3. Strategi Pengembangan Diri, Jen Z.A., PDT, Jakarta:2006 4. Mental Toughness: How to Develop Mental Toughness and An Unbreakable Mindset, Willian Gentry, GPE, 2020 5. Lopez, S.J., dkk, Positive Psychological Assesment: A Handbook of Models and Measures APA, Washington DC:2009 6. Reynold K.J., dkk,

					Pscychological of Change: Life Contexts Experiences and Identities, Psychology Press, Now York:2015 7. VanBreda A.D., Resilience Theory: A Literature Review, MPI, Pretoria:2001

b. SKK

No	Materi	Deskripsi Materi	Kisi-Kisi Materi	Target Konstruksi Berfikir	Referensi Primer
SKK					
1	Gender II	1. Feminisme 2. Konsep Praktek Ansos Perspektif Adil Gender 3. Pengarus Utamaan Gender (PUG)	1. Pengertian Feminisme 2. Aliran-Aliran Feminisme; Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal, Feminisne Sosialis, Feminisme Kontemporer, Feminisme Muslim 3. Gelombang Feminisme (Fokus Gerakan dan Wilayah Gerakan di setiap Gel.); Gel. I (1890an-1950an), Gel.	1. Peserta Memahami Pengetian Feminisme 2. Peserta Memahami Aliran-Aliran Feminisme; Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal, Feminisne Sosialis, Feminisme Kontemporer, Feminisme Muslim 3. Peserta Memahami Gelombang Feminisme (Fokus Gerakan dan Wilayah Gerakan di	1. Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, Rosemarie Putnam Tong, Jalasutra, Yogyakarta:2017 2. Analisis Gender dalam Pembangunan Hukum: Aplikasi Gender Analysis Pathway (GAP), BPPN, Jakarta:2001

			II (1960an-1980an), Gel. III (1990an-2008), Gel. IV (2008-Sekarang) 4. Pengertian, Strategi, dan Praktek Ansos Perspektif Adil Gender 5. Pengarus Utamaan Gender; SDGs dan turunannya	setiap Gel.); Gel. I (1890an-1950an), Gel. II (1960an-1980an), Gel. III (1990an-2008), Gel. IV (2008-Sekarang) 4. Peserta Mampu dan Memahami Pengertian, Strategi, dan Praktek Ansos Perspektif Adil Gender 5. Peserta Memahami Pengarus Utamaan Gender; SDGs dan turunannya	3. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Mansour Fakih, Insist Press, Yogyakarta:2016 4. Gender dalam Perspektif Psikologi, Haris Hardiansyah, Salemba Humanika, Jakarta:2016 5. Gender Second Edition, Harriet Bradley, Polity Press, Cambridge UK:2007 6. Studi Pengarusutamaan Gender, Dr. Mudji Estiningsih, Mahara Publishing, Tangerang:2018 7. Inpress Nomor 9 Tahun 2000 8. New Dimensions of Gender Mainstreaming and Women Empowerment, Moly Kuruvilla, IGI Global, USA:1990
2	Gerakan Perempuan di Indonesia	1. Catatan Sejarah Gerakan Perempuan di Indonesia 2. Fase Gerakan Perempuan di	1. Sejarah Kemunculan Gerakan Perempuan di Indonesia 2. Tokoh Kemunculan Gerakan Perempuan di Indonesia	1. Peserta Memahami Sejarah Kemunculan Gerakan Perempuan di Indonesia 2. Peserta Memahami Tokoh Kemunculan	1. Perempuan-perempuan pengukir sejarah, Mulyono Atmosiswartoputra, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2018

		Indonesia	3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Perempuan di Indonesia; Internal, Eksternal 4. Gerakan Perempuan di Indonesia dari masa ke Masa; Pra Kemenrdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Milenial 5. Kongres Ulama Perempuan Indonesia sebagai Gerakan Perempuan Muslim Di Indonesia	Gerakan Perempuan di Indonesia 3. Peserta Memahami Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Perempuan di Indonesia; Internal, Eksternal 4. Peserta Memahami Gerakan Perempuan di Indonesia dari masa ke Masa; Pra Kemenrdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Milenial 5. Peserta Memahami Kongres Ulama Perempuan Indonesia sebagai Gerakan Perempuan Muslim Di Indonesia	2. Gerakan Perempuan dan Kesadarannya, Kalyanamitra, Pusan Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta 3. Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia, Mutiah Amini, Gajah Mada University Press, Yogyakarta:2021 4. Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (Terjemahan), Cora Vreede-De Stuers, Komunitas Bambu, Depok:2017 5. Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, K.H. Husein Muhammad, IRCiSoD, Yogyakarta: 2020 6. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, Fauzi Ridjal dkk, Tiara Wacana Yogya, Yigyakarta: 1993 7. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia Saskia Eleonora

					Wieringa, Gerba Budaya dan Kalyanamitra, 1999 8. Pergolakan Ideologi: Gerakan Perempuan di Indonesia, Jaleswari Promodawardhani dkk,Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta:2004 9. Ulama Perempuan Indonesia, Boerhan, GPU, Jakarta:2002
3	Teknik Lobby dan Penguatan Jaringan	1. Konsep Lobi dan Negosiasi 2. Strategi Membangun Jaringan	1. Pengertian Lobi dan Negoisasi serta tahapannya 2. Prinsip dasar Lobi dan Negosiasi 3. Teknik Komunikasi; Verbal, Non Verbal, Interpersonal, dan Intrapersonal 4. Strategi membangun jaringan; intra kampus,ekstra kampus, stake holder, masyarakat	1. Peserta Memahami Pengertian Lobi dan Negoisasi serta tahapannya 2. Peserta Memahami prinsip dasar Lobi dan Negosiasi 3. Peserta Memahami Teknik Komunikasi; Verbal, Non Verbal, Interpersonal, dan Intrapersonal 4. Peserta Memahami Strategi membangun jaringan; intra kampus,ekstra kampus, stake holder, masyarakat	1. Komunikasi Efektif dalam Negosiasi, Ardhoyo, Mandala Nasional Pu lishing, Jakarta: 2014 2. Lobbying and The Law, Edgar Lane, University of California Press, Berkeley:1964 3. Pengantar Ilmu Komunikasi, David Djerubu dkk, Pradina Pustaka, Sukoharjo: 2022 4. Developing Interpersonal Skills: Mengembangkan Keterampilan Antar Pribadi, Muhammad

					Basri wello, Beta Aksara, Kota Batu: 2021 5. Intrapersonal Communication: Different Voices, Different Minds, Donna R. Vocate, Lawrence Erlbaum Associates, Hove UK: 1994 6. Skill With People revised Edition, Leslie T. Giblin, Bulksales, 2010 7. Tips Jitu Lobi, Negosiasi san Memengaruhi Orang Lain Secepat Kilat, Sudiana Handika, Saufa, Yogyakarta:2016
4	Penguasaan Media	1. Media Massa 2. Media Sosial	1. Pengertian Media Massa 2. Strategi dalam Media Massa 3. Praktek Pengelolaan Opini, Framing, Priming, 4. Pengertian dan jenis Media Sosial 5. Digital Skill; Produksi, Upload, Kampanye,	1. Peserta Memahami Pengertian Media Massa 2. Peserta Memahami Strategi dalam Media Massa 3. Peserta Memahami dan Praktek Pengelolaan Opini, Framing, Priming, 4. Peserta Memahami Pengertian dan jenis	1. Komunikasi, Media Massa, dan Khalayak, A.S. Achmad, Hasanuddi University Press, Ujung Pandang:1992 2. Media relations: Teori, Strategi, Praktik, dan Media Intelijen, Iswandi Syahputra, Rajawali Press,

			Evaluasi 6. Digital Safety: warning kekerasan berbasis gender online	Media Sosial 5. Peserta Memahami dan Praktek dalam Digital Skill; Produksi, Upload, Kampanye, Evaluasi 6. Peserta memahami Digital Safety: warning kekerasan berbasis gender online	3. Seni Menulis Opini, Okky Madasari, OM Team: 2021 4. Publik Opini, jajasan Priangan I dah, Bandoeng: 1968 5. Opini Publik: Konsep, Pembentukan, dan Pengukuran, Iswandi Syahputra, Simbiosa Rekatama Media, 6. Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial, Shiefti Dyah Alyusi, Prenada Media:2019 7. Media Sosial: Agama Baru Masyarakat Mikenial, Nurudin, Intrans Publishing Malang:2018 8. Ruang Opini Publik, Trei Wijaya N. Kusuma Deepublish, Yogyakarta:2019 9. Seri Modul Literasi Digital Kominfo-Japelidi-Siberkreasi 2021-2024, Novi Kurnia dkk
	Arah Gerakan Kopri	1. Arah Gerakan Internal	1. Peningkatan Kualitas SDM (1)	1. Peserta Mampu Meningkatkan Kualitas	1. Priyono dkk, Manajemen Sumber

		2. Arah Gerakan Eksternal	2. Penguatan Institusi (1) 3. Penguatan Jaringan Alumni (1) 4. Penguatan Wacana (1) 5. Penguatan Ideologi dan Paradigma Gerakan Kopri (1) 6. Kopri dengan Organisasi Perempuan (2) 7. Kopri dengan Stakeholder (2) 8. Kopri dengan Organisasi/ Lembaga Swasta (2)	SDM (1) 2. Peserta Mampu melakukan Penguatan Institusi (1) 3. Peserta Mampu melakukan Penguatan Jaringan Alumni (1) 4. Peserta Mampu melakukan Penguatan Wacana (1) 5. Peserta Mampu melakukan Penguatan Ideologi dan Paradigma Gerakan Kopri (1) 6. Peserta Mampu melakukan Kolaborasi kelembagaan Kopri dengan Organisasi Perempuan (2) 7. Peserta Mampu melakukan Kolaborasi Kelembagaan Kopri dengan Stakeholder (2) 8. Peserta Mampu melakukan Kolaborasi Kelembagaan Kopri dengan Organisasi/ Lembaga Swasta (2)	Daya Manusia, Zifatama Publisher, Sidoarjo:2008 2. Charles Soetyono Iskandar dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Technopreneur, Deepublish:2019 3. Sri Larasati, Manajemen Sumber daya Manusia, Deepublish, STP AMPTA :2018 4. Friedman, Andrew L. dan Samantha Miles, STAKEHOLDERS: Theory and Practice. Oxford University Press. New York: 2006 5. Morris, John C. et al., Advancing Collaboration Theory: Models, Typologies, and Evidence. Routledge , New York: 2016 6. Agranoff, Robert dan Michael McGuire., Collaborative Public Management: New

					Strategies for Local Governments. Georgetown University Press, Washington DC: 2003
5	Sinergi Kopri dengan Gerakan Multisektor	1. Konsep sinergi dan muktisektor 2. Research sector strategis wilayah	1. Pengertian Sinergi dan Multisektor 2. Model Pendekatan Multisector Analysis (MSA) 3. Pemetaan sektor strategis wilayah 4. Strategi membangun sinergi dengan gerakan multisektor (Konsep Pentahelix; Government, Business, Academic, Community, dan Media)	1. Peserta Memahami Pengertian Sinergi dan Multisektor 2. Peserta Memahami Model Pendekatan Multisector Analysis (MSA) 3. Peserta mampu memetakan sektor-sektor strategis yang ada di wilayah 4. Peserta Mampu Menyusun Strategi Membangun Sinergi Dengan Gerakan Multisektor (Konsep Pentahelix; Government, Business, Academic, Community, dan Media)	1. Manajemen Strategi Sektor Publik: Konsep, Teori dan Implementasi, Yonge Liston Verwin Sihombing dkk, Expert, Yogyakarta:2021 2. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik, Retno Sunu Astuti dkk, Universitas Diponegoro Press, Semarang: 2020
6	Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	1. Konsep Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender 2. Praktik Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	1. Pengertian Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender 2. Skema Kebijakan Publik Berbasis Gender 3. Pendekatan dan Analisis Kebijakan Publik yang	1. Peserta Memahami Pengertian Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender 2. Peserta Memahami Skema Kebijakan Publik Berbasis Gender 3. Peserta Memahami	1. Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek, Ismail Nawawi, PMN, Surabaya:2009 2. Dasar-Dasar Pendidikan Advokasi, Ishaq, STAIN Kerinci

			Berkeadilan Gender 4. Strategi Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender 5. Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender 6. Praktik Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	Pendekatan dan Analisis Kebijakan Publik yang Berkeadilan Gender 4. Peserta Memahami Strategi Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender 5. Peserta Memahami Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender 6. Peserta mampu Melakukan Praktek Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	Press, Sungai Penuh:2006 3. Pemahaman kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Nuryanti Mustari, Leutika Prio, Yogyakarta:2015 4. Analisis Kebijakan Publik, Dr. Bambang Sudaryana, M,Si, Deepublish, Yogyakarta:2017 5. Analisis Kebijakan Publik, Indra Muda, Media Persada, edan: 2017 6. Pengantar Kebijakan Publik, Dody Setyawan Intelegensia, Malang:2017 7. Negara dan Perempuan, Dr. Muhajir M. Darwin, Graha Guru, Yogyakatta:2005 8. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinyadi Indonesia, Erwan Agus P. dkk, Gava Media,

					Yogyakarta:2012 9. Implementasi kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus, Dr. Syahruddin, M.Si, Nusa Media, Bandung:2017 10. Pembakuan Peran-Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia, Liza Hadiz dkk, LBH-APIK, Jakarta:1998 11. Kebijakan Publik Pro Gender, Ismi DwiAstuti Murhaeni, Sebelas Maret University Press, Surakarta 12. Gender dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2001, Jakarta:2001
8	Sejarah Gerakan Perempuan Lokal (Pilihan)				

c. SKKN

No	Materi	Deskripsi Materi	Kisi-Kisi Materi	Target Konstruksi Berfikir	Referensi Primer
			SKKN		
1	Gender III	1. Teori dan	1. Teori dan pendekatan	1. Peserta memahami teori dan	1. Budiman Arief.1986.

		Pendekatan Gender Lanjutan 2. Analisis Gender dan Isu Sosial	Gender 2. Gender dan Agama 3. Gender dan Pendidikan 4. Gender dan Politik 5. Gender dan Komunitas 6. Gender dan Ekonomi 7. Gender dan Keluarga 8. Gender dan Kesehatan Reproduksi 9. Gender dan Media	pendekatan gender; Nature dan nurture, Psikoalanisa, Fungsionalis dan Marxis 2. Peserta mampu memahami teks Hindu, Budha, Kristiani dan Islam 3. Peserta mampu menganalisis problema perempuan dan Pendidikan 4. Peserta mampu menganalisis problema politikus perempuan dan Kepemimpinannya 5. Peserta mampu menganalisis problema komunitas masyarakat adat di Indonesia 6. Peserta mampu menganalisis problema Traficking dan TKW 7. Peserta mampu menganalisis problema KDRT 8. Peserta mampu menganalisis problema angka kematian Ibu dan Bayi 9. Peserta mampu menganalisis problema perempuan dan Iklan	Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran wanita dalam Masyarakat. Jakarta: Gramedia 2. Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996 3. Puspitawati, H, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitadi Indonesia. PT IPB Press, Bogor:2012
2	Strategi Pengelolaan SDA		1. Posisi Perempuan dalam Paradigma Pembangunan	1. Peserta Memahami Posisi Perempuan dalam	1. Ekofeminisme:Perempuan dan Permasalahan

	Perspektif Ecofeminism		2. Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional 3. Analisis Dampak Perubahan Kondisi dalam kerusakan Ekologi sesuai dengan isu nasional di Indonesia 4. Strategi Pengelolaan SDA perspektif Ekofeminisme di Indonesia**;** Matrik IFAS, Matrik EFE,Analisis Matriks IE, Analisis Matriks Space, Pengambilan Keputusan melalui Analisis SWOT 5. Mitigasi terhadap hasil keputusan	Paradigma Pembangunan 2. Peserta Memahami Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional 3. Peserta Mampu Menganalisis Dampak Perubahan Kondisi dalam kerusakan Ekologi sesuai dengan isu nasional di Indonesia 4. Peserta Mampu Membuat Strategi Pengelolaan SDA perspektif Ekofeminisme di Indonesia; Matrik IFAS, Matrik EFE,Analisis Matriks IE, Analisis Matriks Space, Pengambilan Keputusan melalui Analisis SWOT 5. Peserta Mampu Membuat Rancangan Mitigasi terhadap hasil keputusan	Lingkungan, Dr. Muryani, Indomedia Pustaka, Sidoarjo:2017 2. Ekofeminisme dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya, Dewi Candraningrum dkk, Jalasutra, Yogyakarta:2017 3. Ekofeminisme II: Narasi Iman, Mitos, Airan Tanah, Dewi Candraningrum dkk, Jalasutra, Yogyakarta:2014 4. Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim dan Memori Rahim, Dewi Candraningrum dkk, Jalasutra, Yogyakarta:2018 5. Ekofeminisme: Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dwn Feminis, Wyatmi dkk, Cantrik Pustaka, Yogyakarta:2017 6. Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari, Bernadus W.S., LP Universitas Atma Jaya, Yogyakarta:

					2009 7. Sastra Ekologis: Teori dan Praktik Pengkajian, Suwardi Endraswara dkk, CAPS, Jakarta:2016 8. Ekologi dan Sumber Daya Alam, Daryanto, Tarsito, Bandung: 1995 9. Bagaimana Melestarikan Sumber Daya Alam Dian Hendrika Guci, Satubuku, Jakarta:2016 10. Ensiklopedia Sumber Daya Alam Indonesia, Arga Laksana, Khazanah Pedia, Yogyakarta:2017 11. Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi, Aidin, Tunggal Mandiri Publishing, Malang:2017 12. Ekofeminisme Perempuan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah, Dr. Sari Marlina, S.Hut., M.Si., Nasya Expanding Management, Pekalongan:2019
3	Strategi Kedaulatan Pangan Berbasis		1. Posisi Perempuan dalam Paradigma Pembangunan 2. Peran Perempuan dalam	1. Peserta Memahami Posisi Perempuan dalam Paradigma Pembangunan	1. Lahan dan Kedaulatan Pangan Gatot Irianto, Gramedia Pustaka Utama,

	Keadilan Gender		Pembangunan Nasional 3. Pilar-Pilar Kedaulatan Pangan di Indonesia 4. Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan berbasis keadilan Gender 5. Strategi Adaptasi Gender dalam Menghadapi Krisis Pangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia 6. Mitigasi terhadap hasil keputusan	2. Peserta Memahami Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional 3. Peserta Memahami Pilar-Pilar Kedaulatan Pangan di Indonesia 4. Peserta Mampu Menganalisis Kebijakan Ketahanan Pangan berbasis keadilan Gender 5. Peserta Mampu Membuat Strategi Adaptasi Gender dalam Menghadapi Krisis Pangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia 6. Peserta Mampu Membuat Mitigasi terhadap hasil keputusan	Jakarta:2016 2. Membangun Pertanian dan Panganuntuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Syamsul Rahman, Deepublish, Sleman:2018 3. Wanita dalam Pembangunan, Anonym, Kantor Menteri Muda Urusan Wanita, Jakarta: 1981 4. Peningkatan Peran Wanita sebagai Mitra Sejajar Pria dalam Menunjang Pembangunan Nasional, Ratna Murad, BPPDDN, Jakarta:1996 5. Peranan Wanita Indonesia dalam Pembangunan, Anonym, Norindo Pratama, Jakarta:1975 6. Model Ketahanan Pangan Berperspektif Gender, Purwanto, Ombak, Yogyakarta: 2017
4	Historiografi NU		1. Khittah NU (Era Liberalisasi, Era Partai, Era Represi, dan Era Kebebasan)	1. Peserta Memahami Khittah NU (Era Liberalisasi, Era Partai, Era Represi, dan Era Kebebasan)	1. Ahmad Baso, Historiografi Khittah dan Politik NU, YGB, Jakarta:2021

			2. Lahirnya Organisasi Perempuan NU (Muktamar ke-XIII sampai Terbentuknya NOM-Muslimat-Fatayat-IPPNU) 3. Sejarah Pergerakan Perempuan NU di Indonesia (Masa Awal Kemenrdeksan, Masa OrLa, Masa Transisi Ola ke Orba, Masa Orba hingga Khittah 1926) 4. Strategi Kopri dalam Peta Gerakan Perempuan NU di Tingkat Nasional dan Internasional	2. Peserta Memahami Lahirnya Organisasi Perempuan NU (Muktamar ke-XIII sampai Terbentuknya NOM-Muslimat-Fatayat-IPPNU) 3. Peserta Memahami Sejarah Pergerakan Perempuan NU di Indonesia (Masa Awal Kemenrdeksan, Masa OrLa, Masa Transisi Ola ke Orba, Masa Orba hingga Khittah 1926) 4. Peserta Memahami Strategi Kopri dalam Peta Gerakan Perempuan NU di Tingkat Nasional dan Internasional	2. Afifah N.D., Menapak Jejak fatayat NU: Sejarah Gerakan Pengalaman dan Pemikiran, Fatayat NU, Jakarta:2005 3. Baidlowi A.H, di bawah redaksi Lies M. Macoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman Perempuan Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual pada MPOPI:Studi Kasus Muslimat NU INIS, Jakarta:1993 4. Blackburn S., Kongres Perempuan Pertama:Tinjauan Ulang YOI, Jakarta:2007 5. Aisyah Dahlan, Sejarah Lahirnya Muslimat Nahdlatul 'Ulama di Indonesia, Jamunu, Jakarta:1955 6. Abraham S.W., NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU, Pyramida Media Utama, Jakarta:2009
5	Kopri Perspektif Ideologi Politik		1. Definisi ideologi secara teoritik dan konseptual	1. Peserta memahami definisi ideologi secara teoritik dan	1. Konsep Ideologi, Jorge Larrain, Terj: Ryadi

	dan Organisasi		2. Pengertian konsep ideologi aswaja 3. Garis perjuangan Kopri 4. Refleksi keorganisasian	konseptual 2. Peserta memahami pengertian konsep ideologi aswaja 3. Peserta memahami Garis perjuangan Kopri 4. Peserta mampu melakukan Refleksi keorganisasian	Gunawan, LKPSM, Yogyakarta: 1996 2. Mengenal Tradisi dan Hujjah aswaja An-Nahdliyah, Zubaidi Lingkar Media, Bantul: 2016 3. Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama, Khalista, Surabaya:2007
6	Community Organizing		1. Definisi Community Organizing 2. Prinsip-Prinsip dalam Community Organizing 3. Syarat-Syarat Community Organizing 4. Langkah-langkah dalam Community Organizing; Recognizing, gaining, Organizing, Assesing, Determining, Arriving, Implementing, Evaluating, Maintaining, Looping 5. Strategi dan Pendekatan Community Organizing 6. Studi Kasus dan Role Play	1. Peserta Memahami Definisi Community Organizing 2. Peserta Memahami Prinsip-Prinsip dalam Community Organizing 3. Peserta Memahami Syarat-Syarat Community Organizing 4. Peserta Memahami Langkah-langkah dalam Community Organizing; Recognizing, gaining, Organizing, Assesing, Determining, Arriving, Implementing, Evaluating, Maintaining, Looping	1. Herbert J. Rubin dkk, Community Organizing and Development, Pearson Education, Boston:2008 2. Ahc. Wazir W., Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar, SBPM, Bogor:2001 3. Murray G. Ross, Community Organization: Theory and Principles, Harper and Row, New York:1967 4. Ross Gittell, Community

				5. Peserta Memahami Strategi dan Pendekatan Community Organizing 6. Peserta Mampu Melakukan Studi Kasus dan Role Play	Organizing: Building Social Capital as a development Strategy, Sage Publication, Inggris:1998 5. Korten, David C., Community Organization and Rural development: a Learning Process Approach, The Ford Foundation, UK:1980 6. Melvin Delgago dkk., Youth-Led Community Organizing, Oxford University Press, UK:2007
7	Geo Ekonomi, Geo Politik dan Geo Strategi Gerakan Perempuan		1. Sejarah Geopolitik 2. Teori-Teori Geopolitik; The Origins Scientism and Darwinism, dll 3. Geopolitik, Geostrategi dan Tatanan Dunia Baru 4. Perang, Geoekonomi, dan Geopolitik Minyak Dunia 5. Tantangan Perempuan dalam Menghadapi Persaingan dalam Geoekonomi dan Geopolitik 6. Pemetaan Peluang Kader Kopri di Dunia Ekonomi	1. Peserta memahami arti Konsep Geopolitik dan Geostrategi serta Sejarah Perkembangannya 2. Peserta mengetahui para teoritikus geopolitik dan geostrategi dan memahami pemikirannya 3. Peserta mampu menjelaskan perkembangan dunia dalam konteks geopolitik dengan menggunakan teori-teori yang telah dipahami 4. Peserta mampu menjelaskan arti strategis	1. *Foster,* John B.**,** The New Geopolitics of Empire**.** *Monthly Review:* 2006 2. Kristof, Ladis K.D. The Origin and Evolution of Geopolitics. *Journal of Conflict Resolution:* 1960 3. Sempa, Francis, *Geopolitics, from Cold War to the 21st Century,* Transaction Publisher: 2002 4. Gough, Barry, Inventing Grand Strategy and Teaching Command: The Classic Works of Alfred

			dan politik di Indonesia 7. Analisis SWOT 8. Form analisis SWOT	minyak bagi negara dan strategi negara dalam memenuhi kebutuhan minyaknya 5. Peserta mampu mengidentifikasi kualitas diri 6. Peserta memahami tentang peluang-peluang yang dapat direbut diranah politik dan ekonomi 7. Peserta mampu melakukan analisis SWOT	Thayer Mahan Reconsidered**.** Naval War College Review: 2000 5. Short, J.R. *An Introduction to Political Geography*. London: Routledge: 1993 6. Anonym. Geopolitics of Oil. *Science New Series* (210) 4476, hlm. 1324-1327: 1980 7. Gyorgy, Andrew, The Geopolitics of War: Total War. *The Journal of Politics* (5) 4, hlm. 347-362: 1943 8. Engdahl, William F. Revolution, Geopolitics and Pipelines**.** *Global Economy:* 2005 9. Roberts, Susan et. al.Neoliberal Geopolitics 10. Juniawan Priyono, Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi, Unhan Press,Bogor:2017

G. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Kaderisasi Formal SIG, SKK, dan SKKN

1. Rencana Tindak Lanjut Sekolah Islam dan Gender (SIG)

Rencana tindak lanjut SIG adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota perempuan PMII yang telah melaksanakan SIG. Rangkaian kegiatan tersebut berfungsi untuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya KOPRI khususnya dan sebagai media bimbingan khusus bagi anggota kader-kader perempuan PMII.

a. Tujuan

RTL bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman anggota baru PMII atas materi-materi MAPABA dan SIG. Selain itu RTL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan khusus anggota baru.

b. Penyelenggara

Penyelenggara RTL dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi Kopri dan peserta yang dibentuk dalam sesi general review dan RTL SIG.

c. Kegiatan RTL

Kegiatan RTL sebagai upaya pembekalan keterampilan dasar berorganisasi dan keterampilan tambahan sehingga diharapkan anggota benar- benar memiliki kemampuan lebih dibanding mahasiswa non-PMII. Dan yang paling penting terbentuk kesadaran tentang sensitif gender tanpa menghilangkan nilai-nilai PMII. Kegiatan RTL sebagai berikut:

1) Sekolah Administrasi Kopri

Pelatihan ini diharapkan peserta mampu membaca dan menelaah terkait pola relasi KOPRI dan PMII kemudian diperjelas dalam Peraturan Organisas KOPRI (masalah penomoran surat dll) .Di dalam modul juga dijelaskan KOPRI sebagai Badan Semi Otonom yang mempunyai legitimasi seperti PMII dalam berbareng bergerak bersama untuk memajukan organisasi.

2) Pelatihan Fasilitator SIG

Membentuk calon fasilitator yang memiliki kecakapan dalam pengelolaan pelatihan kaderisasi formal KOPRI di tingkatan

SIG

3) Sekolah Jurnalistik Berbasis Gender

Mencetak jurnalis yang mempunyai pemahaman yang berkeadilan gender.

2. Rencana Tindak Lanjut Sekolah Kader Kopri (SKK)

Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah fase penanaman nilai-nilai dan misi pergerakan serta pembentukan militansi anggota untuk menjadi kader KOPRI. SKK merupakan fase dalam kaderisasi KOPRI dan diikuti oleh kader perempuan yang telah mengikuti Sekolah Islam Gender bersama pembelajaran 6 bulan dan PKD.

Rencana tindak lanjut SKK adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk Kader Kopri yang telah melaksanakan SKK. Rangkaian kegiatan tersebut berfungsi untuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya dan KOPRI khususnya serta sebagai media bimbingan khusus bagi kader Kopri.

a. Tujuan

RTL bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman Kader Kopri atas materi-materi SIG dan SKK. Selain itu RTL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan khusus kader Kopri.

b. Penyelenggara

Penyelenggara RTL dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi KOPRI dan peserta yang dibentuk dalam sesi general review dan RTL SKK.

c. Kegiatan RTL

Sebagai upaya pembekalan ketrampilan sehingga diharapkan kader KOPRI benar-benar memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri dan lingkungannya. Dan yang paling penting terbentuk kesadaran tentang sensitif gender tanpa menghilangkan nilai-nilai PMII. Kegiatan RTL sebagai berikut:

1) Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Kader Kopri mampu memahami secara keseluruhan pelaksanaan PPRG mulai dari konsep, pelaksanaanan monitoring evaluasi pada program pembangunan

menggunakan Pengarus Utamaan Gender (PUG). Pelatihan ini sangat diwajibkan kepada kader Kopri untuk memahami tentang kebijakan-kebijakan anggran yang sensitif gender. KOPRI harus mampu membaca dan menganalisa anggaran-anggaran pemerintah dan pengalokasiannya. Termasuk menginventarisir masalah-masalah pembangunan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek

2) Sekolah Advokasi Berbasis Gender

   Diharapkan kader-kader Kopri mampu untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat dengan pisau analisis gender. Pelatihan ini dimaksudkan agar kader-kader Kopri peka terhadap kondisi dan realita yang memarginalkan, strereotype, mensubordinasi perempuan, dan lain-lain. Terlebih kader Kopri mampu mengadvokasi/ melakukan pendampingan masyarakat yang lebih luas

3) Pelatihan Fasilitator Wilayah (Faswil) Kopri

   Membentuk satuan timsus fasilitator wilayah dalam pengawalan dan pendampingan proses kaderisasi formal Kopri dalam tingkatan SKK

3. Rencana Tindak Lanjut Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN)

Rencana tindak lanjut SKKN adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk kader Kopri yang telah melaksanakan SKKN. Rangkaian kegiatan tersebut berfungsi untuk membekali dan mengarahkan dalam hal-hal pengembangan keorganisasian PMII umumnya dan KOPRI khususnya serta sebagai media bimbingan khusus bagi anggota kader-kader Kopri.

a. Tujuan

   RTL bertujuan untuk menjaga, memperdalam dan mengembangkan pemahaman Kader Kopri atas materi-materi SKK dan SKKN. Selain itu RTL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan khusus kader Kopri.

b. Penyelenggara

   Penyelenggara RTL dikoordinasikan oleh bidang kaderisasi Nasional Kopri dan peserta yang dibentuk dalam sesi general review dan RTL SKKN.

c. Kegiatan

1) Sekolah Kepemimpinan Perempuan Nasional

   Menciptakan pemimpin perempuan di tingkatan nasional yang memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, serta komitmen untuk melakukan perubahan di masyarakat luas, serta mengusung pemikiran-pemikiran yang responsive gender di tataran kebijakan-kebijakan pembangunan nasional

2) Sekolah Kader Influencer Nasional

   Melahirkan influencer nasional dan global yang bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan, mewujudkan keadilan, perdamaian dunia, dan peradaban agung yang berdasarkan Pancasila. Lebih khususnya menjadikan kader-kader Kopri Nasional menjadi perempuan-perempuan berpengaruh baik di tataran nasional dan dunia.

3) Pelatihan Fasilitator Nasional (Fasnas) KOPRI

   Membentuk satuan timsus fasilitator nasional dalam pengawalan dan pendampingan proses kaderisasi formal Kopri dalam tingkatan SKK dan SKKN.

BAB IV
PENUTUP

Buku panduan merupakan salah satu media yang berperan penting dalam proses kaderisasi khususnya Kopri untuk menghadirkan sistem kaderisasi yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan setiap kader Kopri di berbagai wilayah namun dalam penyusunan Buku Pedoman Kaderisasi Kopri ini pastilah jauh dari kata sempurna, untuk itu upaya berupa kritikan dan saran sangat berarti bagi kami sebagai metode penyempurnaan Buku Pedoman ini.

Tentu saja pada setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda, namun semoga dengan adanya buku pedoman kaderisasi Kopri ini, dapat menjadi acuan dan referensi kader-kader Kopri dalam menjalankan roda kaderisasi, buku pedoman kaderisasi ini dibuat dalam upaya memberikan panduan kaderisasi Kopri agar lebih sistematis, terukur, dan terarah.

Akhir kata kami dari tim penyusun buku pedoman kaderisasi Kopri jika terdapat salah penulisan itu semua murni dari kami yang jauh dari kata sempurna dan memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq 'Ila aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A., Jen Z. 2006. *Strategi Pengembangan Diri*. A. Jakarta: PDT.

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.

Al-Anqary, Abdullah bin Abdul Aziz bun Abdullah. 2017. *Membedah tauhid* Uluhiyyah *Bersama Ulama Mazhab Syafi'I.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.

Al-Khusyt, Muhammad Utsman. 2018. *Wanita Dalam Bingkai Empat Madzhab.* Surabaya: Pustaka Yasir.

Alwi, Muh. 2020. *Pengantar Al-Qur'an dan Hadis untuk Indonesia*. HS.

Amir, Majdah. 2020. *Buku Pegangan Utama Fiqih Wanita.* Jakarta: Media Kreativa

Anonym. 1975. *Peranan Wanita Indonesia dalam Pembangunan*. Jakarta: Norindo Pratama

Anonym. 1981. *Wanita dalam Pembangunan.* Jakarta: Kantor Menteri Muda Urusan Wanita.

Anonym. 1985. *Dokumen Historis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia,* Jakarta: Dicetuskan pada Training Course Keputrian PMII tanggal 16 Februari 1966.

Anonym. 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Bandung: Humaniora Utama Press.

Anonym. 2007. *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*: *PWNU Jatim*. Surabaya: Khalista.

Anonym. 2016. *Khazanah Aswaja*. PWNU Jawa Timur: Tim Aswaja NU Center.

Anonym. 2019. *Strategi Pengembangan Kopri* "Keputusan-Keputusan" Muspimnas.

Anonym. 2021. *Panduan Modul Kaderisasi PB PMII periode 2017-2021.*

Armahedi, Mahzar. 2004. *Revolusi Integralisme Islam: Merumuskan Paradigma Sains dan teknologi.* Bandung: Mizan.

Armia, dkk.2019. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat.* Jakarta: PMG.

Burlian, Paisol. 2016. *Konsep Kesaksian: Perempuan dalan Perkawinan dalam* Kompilasi *Hukum Islam Perspektif Hukum Tata Negara*. Palembang: FDK UIN Raden Fatah.

Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional Asia tenggara, Teropong* Dinamika*, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Campbell, Megan. 2018. *Women, Poverty, Equality: The Role of CEDAW*. Oregon: Hart *Publishing* Oxford and Portland.

Djajanegara, Soenarjati. 2000. *Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Endang. 1978. F*eminin.* Jakarta:Ris Therik.

Fealy, Greg. 2011. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKIS.

Gentry, Willian. 2020. *Mental Toughness: How to Develop Mental Toughness and An Unbreakable Mindset*. GPE.

Haedy, Samantha, dkk. 2016. *Sex, Gender, Sexuality and the Law: Social and Legal Issues Faced by individuals, Couples, and Families*.

Hasan, Farid Nu'man. 2018. *Fiqih Perempuan Kontemporer.* Malang: Gema Insani.

Hearty Free. 2015. *Keadilan Gender: Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah*. Jakarta: YPOI.

Hermawan , Wawan. 2019. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: UPI Press.

Irianto, Gatot. 2016. *Lahan dan Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam* Penafsiran. Yogyakarta: LKIS.

Iqbal , Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PMG.

Kristeva, Nur Sayyid Santoso. 2012. *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Larrain, Jorge. 1996. *Konsep Ideologi, Terj: Ryadi Gunawan*. Yogyakarta: LKPSM.

Lopez, S.J., dkk. 2009. *Positive Psychological Assesment: A Handbook of Models and Measures*, Washington DC: APA.

Manan, Abdul. 2017. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* Depok: Kencana.

Mas'adi, Ghufron Ajib. 1997. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: RGP.

Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam.* Bandung: R.Rosdakarya.

Muhammad, Husein. 2019. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender.* Yogyakarta: Ircisod.

Muhammad, Husein. 2021. *Islam Agama Ramah Perempuan.* Yogyakarta: Ircisod.

Murata, Sachico, dkk. 1997. *Trilogi Islam: Islam, Iman dan Ihsan*. Yogyakarta: Raja *Grafindo* Persada.

Nata, Abuddin. 2011. *Studi islam Komprehensif.* Jakarta: Kencana.

Nyak Umar, Mukhsin. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam.* Banda Aceh: Turats.

Noegroho, Ipnu R. 2019. *Dasar-Dasar Memahami Iman, Islam dan Ihsan*. Jogjakarta.

Purba, dkk. 2016. *Theologi Islam, Hadis.* Medan: Perdana Publishing.

Purwanto. 2017. *Model Ketahanan Pangan Berperspektif Gender.* Yogyakarta: Ombak.

Qardawi, Yusuf. 2006. *Perempuan Perspektif Islam.* Yogyakarta: Pustaka Fahima.

Rafsanjani, Hashemi. 2008. *Aspek-Aspek Pokok Agama Islam: Pandangan Islam tentang HAM, Hegemoni Barat dan Al-Qur'an Hadits Perspektif Gender Solusi Dunia Modern.* Bandung: Nuansa Cendekia.

Rahman, Syamsul. 2018. *Membangun Pertanian dan Panganuntuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. Sleman: Deepublish.

Rahmawati, Ai. 2017. *Buku Kaderisasi KOPRI 2014-2017.*

Reynold K.J., dkk. 2015. *Pscychological of Change: Life Contexts Experiences and Identities*. Now York: Psychology Press.

Rodliyah, Nunung. 2019. *Hukum Islam: Dilengkapi dengan Hukum Islam.* Yogyakarta: Graha Ilmu. Burlian, Paisol. 2016. *Konsep Kesaksian: Perempuan dalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hukum Tata Negara*. Palembang: FDK UIN Raden Fatah.

Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: Garudhawaca.

Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal* Kritik *Satra Feminisme. Yogyakarta:* Garudhawaca.

Sabar, Asep. 2000. *KOPRI Menantang Perubahan*, Jakarta: PT. Bumi Selamat.

Siradj, Said Agil. 2006. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial.* Bandung: Mizan Pustaka.

Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. PMG.

Subhan, Zaitunah. 2016. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKIS.

Sudarto. 2017. *Fikih Munakahat.* Yogyakarta: Deepublish.

Syarbini, Amirullah. 2013. *Islam Agama Ramah Perempuan: Memahami Tafsir Agama dengan Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Asa Prima.

Sumbulan, Umi, dkk. *Studi Al-Qur'an dan Hadits.* Malang: UIN Maliki Press.

Syihab, M. Quraish. 2018. *Islam Yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam.* Yogyakarta: Lentera Hati.

T., Huzaemah.2016. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Yanggo. AMP Press.

T., Ahmet Kuru. 2021. *Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan: Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim.* Jakarta: KPG.

Tihami, dkk. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Press.

Tong, Rosemarie Putnam. 2017. *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.

Umar, Nasaruddin. 2014. *Ketika Fiqh Membela Perempuan.* Jakarta: EMK.

Umar, Nasaruddin. 2017. *Argumen Kesetaraan gender:Perspwktif Aal-Qur'an*. Makassar: Creatif Lenggara.

Umar, Nasaruddin. 2017. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an.* Makassar: Creatif Lenggara.

Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: RGP

VanBreda A.D. 2001. *Resilience Theory: A Literature Review.* Pretoria: MPI.

Za'tari , Syaikh Alauddin. 2019. *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'I*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Zubaidi. 2016. *Mengenal Tradisi dan Hujjah aswaja An-Nahdliyah*. Bantul: Lingkar Media.

Non Buku:

Moordiningsih. 2004. *Islamophobia dan strategi mengatasinya*, Buletin Psikologi. Tahun XII, No. 2, Desember. ISSN:08547108

Ratna *Murad*. 1996. *Peningkatan Peran Wanita sebagai Mitra Sejajar Pria dalam Menunjang Pembangunan Nasional*. Jakarta: BPPDDN.

https://nu.or.id/opini/aswaja-berparadigma-global-htM0Z

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.